

**PANDEMI COVID-19: PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL DAN
EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA BONTANG**

*(THE COVID-19 PANDEMIC: CHANGES IN SOCIAL AND ECONOMIC
BEHAVIOR OF PEOPLE IN BONTANG CITY)*



Oleh :

**JULIANSYAH ROY
RAHCMAD BUDI SUHARTO
ENY ROCHAIDA
WAHYU PRIHANTO**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI (DOKTOR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pandemi Covid-19: Perubahan Perilaku Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Kota Bontang

Ketua Tim Peneliti : Dr. Juliansyah Roy, S.E., M.Si
Anggota : 1. Dr. Rahemad Budi Suharto, SE.,SH.,M.Si
2. Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, M.Si

Sumber Dana : PNB Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi (S-3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

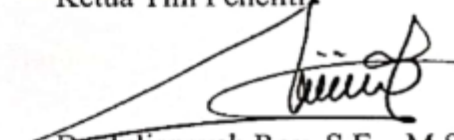
Besar Dana Penelitian : Rp. 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dr. H. Adi Wijaya, M.Si
NIP. 19600606 198803 1 001

Ketua Tim Peneliti



Dr. Juliansyah Roy, S.E., M.Si
NIP. 19801108 200501 1 001

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. H. Syarifah Hidayah, SE, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

LAPORAN PENELITIAN

- Judul Penelitian** : **PANDEMI COVID-19: PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA BONTANG**
- Peneliti** : 1. Juliansyah Roy
2. Rahcmad Budi Suharto
3. Eny Rochaida
4. Wahyu Pihanto (Mahasiswa)
- Metode Penelitian** : Metode Deskriptif Kuantitatif
- Data-Data** : Data Primer dan Sekunder Tahun 2022
- Lama Penelitian** : Tahun 2022
- Luaran Penelitian** : Publikasi Jurnal Internasional
- Biografi Peneliti** : Terlampir Dalam Biodata

JUDUL PENELITIAN

PANDEMI COVID-19: PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA BONTANG (*THE COVID-19 PANDEMIC: CHANGES IN SOCIAL AND ECONOMIC BEHAVIOR OF PEOPLE IN BONTANG CITY*)

ABSTRAK

Wabah virus Corona (COVID-19) yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020 memaksa sebagian besar orang untuk membatasi aktivitasnya. Dari semua lini usaha mikro, kecil, hingga koperasi, pandemi sangat menghantuimereka.

Di Kota Bontang (Kalimantan Timur – Indonesia), pemerintah berupaya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak virus corona dengan meminta semua pihak untuk melakukan social distancing. Work From Home (WFH) dan memutuskan untuk membatalkan kegiatan belajar mengajar. Kebijakan ini tentunya akan berdampak pada perubahan perilaku sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen sosial untuk mengetahui seberapa besar dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku sosial dan ekonomi di Bontang. Hal ini didukung objektivitas melalui survei yang melibatkan 500 unit responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada perubahan perilaku sosial masyarakat, antara lain: 1) responden memahami dan mulai terbiasa dengan kondisi new normal dalam beraktivitas meskipun masih ada harapan kondisi kembali normal segera; 2) responden tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan Protokol Kesehatan meskipun sulit untuk menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari; 3) responden lelah dengan pandemi; 4) Sebagian besar responden setuju dan akan berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19. Sementara itu, perubahan perilaku ekonomi menyimpulkan bahwa dari 500 responden, terdapat 480 responden (96%) yang masih bekerja dan 7 responden (1,4%) working namun dirumahkan sementara, sebanyak 55 responden (31%) dengan peningkatan pengeluaran untuk makanan/minuman siap saji selama pandemi, 85 responden (17%) menurun dan 260 responden tetap (51,8%).

Kata kunci: COVID-19, perilaku, sosial, ekonomi; eksperimental sosial.

ABSTRACT

The Corona virus outbreak (COVID-19) that has occurred in Indonesia since the beginning of March 2020 has forced most people to limit their activities. From all lines of micro, small, to cooperatives, the pandemic very affected them.

In Bontang City (East Kalimantan – Indonesia), the government is trying to make various efforts to reduce the impact of the corona virus by asking all parties to do social distancing. Work From Home (WFH) and decide to cancel teaching and learning activities. This policy will certainly impact changes in social and economic behavior of the community, especially in Bontang City.

This research uses a social experimental approach to find out how much impact the COVID-19 has on changes in social and economic behavior in Bontang. It supported objectivity through a survey covering 500 units of respondents.

The results of the study show that the COVID-19 pandemic has impacted changes in people's social behavior, including: 1) respondents understand and are getting used to the new normal conditions in their activities although there is still hope for conditions to return to normal soon; 2) respondents have no difficulty in implementing the Health Protocol even though it is difficult to implement it in their daily activities; 3) respondents are tiring of the pandemic; 4) Most respondents agree and will participate in the COVID-19 vaccination program. Meanwhile, changes in economic behavior conclude that out of 500 respondents, there are 480 respondents (96%) who are still working and 7 respondents (1.4%) are working but temporarily laid off, were 55 respondents (31%) with increased expenditure on prepared food/beverages during the pandemic, 85 respondents (17%) decreased and 260 respondents remained (51.8%).

Keywords: *COVID-19, behavior, social, economic; social experimental.*

PENDAHULUAN

Sejak kemunculannya terdeteksi di Wuhan (China), COVID-19 telah menjadi perhatian publik pada awal 2020. Kematian ribuan orang akibat virus ini menjadikannya pusat perhatian banyak negara. Pandemi ini terbukti telah memberikan hambatan secara global, termasuk di Indonesia (Damanik & Saragih, 2021). Pola perekonomian yang selama ini berjalan selama ini tiba-tiba turun tajam pada konsumsi, distribusi, dan produksi (Mohsin et al., 2021; Wang dkk., 2021). Karena itu, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah agresif untuk mengurangi tingkat penyebaran secara maksimal.

Mengingat perlunya refocusing pada APBN Kota Bontang 2021 dengan tujuan program yang mendukung pengendalian, penanganan, pemulihan COVID-19 dan penyelarasan dokumen perencanaan dengan situasi pandemi, maka perlu dilakukan kajian mendalam terhadap sektor-sektor yang terdampak selama pandemi. COVID-19, agar proses perencanaan dan kebijakan refocusing anggaran belanja daerah dalam penanganan covid-19 di Kota Bontang tepat sasaran dan bermanfaat.

Orang tidak dapat makan dan menyediakan kebutuhan hidup lainnya jika mereka terus-menerus dikurung di rumah (Singh et al., 2021). Selain itu, hiper inflasi akibat gejolak ekonomi dapat memperburuk kondisi politik, 'panic buying' dan sosial masyarakat (Indah & Muqsith, 2021). Akibatnya, pada akhirnya mereka akan kehilangan pekerjaan dan terseret ke dalam pengangguran dan semakin dekat dengan kemiskinan (Cooper & Gordon, 2021).

Kontribusi dan urgensi penelitian ini adalah memberikan arahan dan rekomendasi dalam rangka refocusing perencanaan dan penganggaran 2021 secara hati-hati untuk mendukung pengendalian, penanganan, dan pemulihan ekonomi serta reformasi sosial di masa pandemi COVID-19 .

Ruang lingkup penelitian meliputi dua jenis, yaitu pengumpulan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder meliputi informasi kondisi masyarakat Kota Bontang selama pandemi, terutama sebaran dan jumlah kasus terkonfirmasi, kasus aktif, dan kematian. Setelah itu, ada informasi kondisi terkini terkait indikator kesejahteraan, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, daya beli dan indikator terkait lainnya. Terakhir adalah desk research dengan mengkaji kajian dan dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan

dilakukan dalam rangka menyempurnakan konsep dan analisis (misalnya Snyder, 2019; Bowen, 2009; Xiao & Watson, 2017; Rashid dkk., 2019).

Kedua, pengumpulan data primer melalui progres Focus Group Discussion (FGD) di tingkat Perangkat Daerah, khususnya bagi Perangkat Daerah yang menangani sektor terdampak COVID-19. Perangkat daerah yang terlibat dalam FGD tersebut meliputi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Departemen Koperasi, UKM dan Perdagangan; Departemen Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Kantor tenaga kerja; Departemen Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian; Dinas kesehatan masyarakat; Departemen Perhubungan; Rumah Sakit Taman Husada; Unit Pegawai Negeri Sipil; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kecamatan Bontang Barat; Distrik Bontang Selatan, Distrik Bontang Utara; PT. Pupuk Kaltim; Badak LNG; dan PT. Indominco Mandiri

Selain itu, wawancara mendalam dilakukan kepada Perangkat/Instansi Daerah terkait untuk mendapatkan informasi program dan target program dalam pencegahan, penanganan, pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di masa pandemi COVID-19, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan. Survei untuk mengetahui sektor-sektor yang terdampak COVID-19 di Kota Bontang. Selanjutnya, peneliti menerapkan analisis data, penyusunan rekomendasi, dan verifikasi.

Ringkasan utama penelitian ini disusun dalam beberapa tahap. Poin pertama menyajikan pendahuluan. Kedua, adalah kajian pustaka. Bagian ketiga mencakup metodologi, dan yang keempat adalah mempresentasikan hasil penelitian. Terakhir, kesimpulan menyoroti implikasi dari temuan, rekomendasi, dan kontribusi di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. COVID-19

Pandemi COVID-19 masih berlangsung dan belum menemukan titik henti penyebarannya. Sejauh ini, per 28 Februari 2021, sudah ada 113.315.218 orang di dunia yang terkonfirmasi positif COVID-19, termasuk 2.517.964 kematian. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 terdeteksi pada 2 Maret 2020. Dan hingga 28 Februari 2021, terdapat 1.334.634 kasus terkonfirmasi positif, termasuk 36.166 kematian (WHO, 2021). Di Kota Bontang sendiri terdapat 5111 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan 83 orang meninggal dunia per update 28 Februari 2021 (Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2020).

Peningkatan jumlah kasus secara merata di seluruh Indonesia berdampak negatif pada berbagai sektor, khususnya perekonomian. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret 2020 memaksa sebagian besar masyarakat untuk membatasi aktivitasnya sehingga dapat mencegah penyebaran virus. Seluruh lini usaha mikro, kecil, dan koperasi terdampak wabah pandemi (Yuhertiana et al., 2022). Penurunan penjualan, penurunan modal, penurunan pesanan, kesulitan bahan baku, dan kredit macet (Tanjung & Purnamadewi, 2021). Ekonomi sempat ambruk dalam sekejap.

Di Indonesia, pemerintah berupaya melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak virus corona dengan meminta semua pihak untuk melakukan social distancing seperti Work From Home (WFH) dan memutuskan untuk membatalkan kegiatan perkuliahan dan belajar mengajar (Ayuningtyas et al., 2021). Pemerintah telah mengaktualisasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM-SM) sebagai pengganti PPKM yang berlangsung hampir sebulan di Jawa dan Bali. Kebijakan itu berubah setelah Presiden Joko Widodo menilai PPKM tidak efektif menekan lonjakan kasus pandemi. PPKM dan PPKM-SM memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Kebijakan tersebut lebih longgar dibandingkan PPKM untuk beberapa koridor. Namun, bahkan dengan relaksasi kebijakan PPKM-SM, tidak dapat meningkatkan belanja publik untuk merangsang peningkatan ekonomi yang signifikan.

2.2. Relaksasi keuangan pemerintah

Pemerintah Pusat telah menyiapkan peraturan atau ketentuan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 'Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan Penanganan COVID-19', Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 'Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19', Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 tentang 'Pembangunan Fasilitas Observasi dan Shelter dalam Pemberantasan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau', Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 'Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Percepatan Penanganan COVID-19', Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang 'Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan COVID-19 ' dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 'Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat', dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang 'PPKM-SM'.

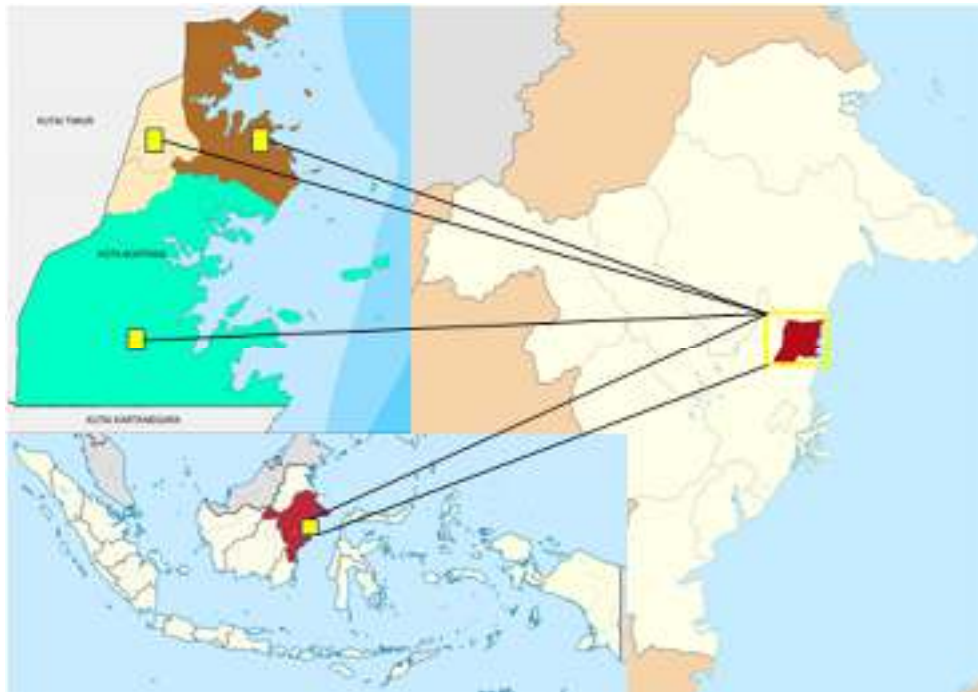
Dalam menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan kebijakan refocusing anggaran atau sentralisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta proses realokasi yang dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Badan Pusat Statistik RI, 2020). Realokasi APBD dapat dipahami sebagai mekanisme perubahan atau perubahan mengalihkan arah tujuan kebijakan anggaran yang digunakan berdasarkan kebutuhan terkait pola pendanaan dalam kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

3.1. Sampel

Kami menerapkan pendekatan studi dengan eksperimen sosial tentang seberapa besar dampak sosial pandemi COVID-19 bagi Kota Bontang (misalnya Roy et al., 2021; Bavel dkk., 2020; Gandasari & Dwidienawati, 2020; Yijo dkk., 2021; Saha dkk. al., 2020). Hal ini mendukung objektivitas melalui survei mendalam kepada pemerintah yang mencakup 500 unit informan, di mana waktu wawancara adalah 3 bulan (Februari-April 2022). Peneliti juga dibantu oleh beberapa kelompok yang tugasnya dibagi menjadi beberapa tahap, seperti observasi, dokumentasi, validasi, dan pengolahan data.

Ukuran sampel adalah 500 sampel, dimana peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Perlu diketahui bahwa teknik ini sangat cocok untuk pengumpulan data lapangan karena peneliti dapat mengetahui dengan pasti target informan yang dituju, misalnya meliputi latar belakang pekerjaan, lapangan, domisili, dan atribut tertentu dengan karakteristik yang tepat dalam menggambarkan hubungan suatu penelitian (Amalia et al., 2020).



Gambar 1: Fokus dan objektivitas

Source: kreasi oleh penulis (2022).

Kelayakan pola penelitian ini juga ditentukan oleh distribusi ukuran sampel dengan margin of error (margin of error) minimal 1%, sehingga tingkat kepercayaan 99% dapat memproyeksikan kualitas data (Hazra, 2017). Dengan tingkat kesalahan 1%, jumlah minimum sampel adalah 475 (Gujarati, 2012) dan kami mempertimbangkan penggunaan 500 sampel dalam penelitian ini untuk memenuhi kriteria atau sangat memadai. Distribusi distribusi sampel dirangkum pada *Gambar 1*.

3.2. Desain dan demarkasi

Alasan logis yang mendasari waktu pelaksanaan dan jumlah sampel cukup terbatas, mengingat situasi dan kondisi selama wabah global ini tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam rentang waktu yang lama, sehingga tim peneliti juga harus memperhatikan '5 M' (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sosial), menghindari kerumunan massal, dan mengurangi mobilitas) selama proses wawancara. Fokus penelitian hanya berfokus pada 3 wilayah (Kecamatan), yaitu Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat dengan keterlibatan informan yang bekerja (karyawan swasta, pemerintah, dan pengusaha) dan mereka yang tidak bekerja (sekolah dan pekerja rumah tangga).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik respondents

Profil responden disajikan pada *Tabel 1*. Alhasil, mereka yang berada di wilayah studi, tepatnya di Kota Bontang, mewakili masing-masing daerah. Penyebaran kuesioner berdasarkan Kabupaten, ternyata Bontang Utara lebih banyak mengeksplorasi dari 2 daerah lainnya, dimana terdapat 228 sampel atau sekitar 45,6% dan sisanya 54,6% terdiri dari Kabupaten Bontang Selatan (184 sampel) dan Kabupaten Bontang Barat (88 sampel).

Untuk sebaran yang mengacu pada jenis kelamin, dari 500 sampel, 265 responden adalah laki-laki (53%) dan sisanya 47% atau 235 responden perempuan. Ada yang perempuan, 6% lebih sedikit dari mereka yang laki-laki. Hal ini juga memberikan sinyal bahwa pekerja telah merasa, mereka yang tergolong pekerja dan berusia produktif (15-64 tahun) adalah kepala rumah tangga dibandingkan dengan perempuan.

Wawancara dilakukan dengan menargetkan responden dari segala usia yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang paling terlihat adalah responden pada kelompok usia 17-25 tahun atau persentasenya mencapai 30,4%, karena interval usia ini adalah mereka yang sedang bersekolah atau sedang mengejar karir. Di satu sisi, dari 500 kuesioner yang dibagikan, hanya 3 responden yang berada pada kelompok usia di bawah 17 tahun (0,6%) dan ini valid atau memenuhi kriteria penelitian, karena berdasarkan tingkat pengetahuan untuk menjawab pertanyaan tim yang diajukan dan latar belakang pendidikan atau pemahaman Responden menentukan arah penelitian ini. Selanjutnya, 26,6% dan 26,8% berada pada kelompok usia 17-25 tahun dan 26-35 tahun dikatakan sebagai 'golden age' seseorang dalam pembangunan peningkatan kesejahteraan.

Kami mewawancarai responden dari segala usia yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Yang paling terlihat adalah responden pada kelompok usia 17-25 tahun atau persentasenya mencapai 30,4%, karena interval usia ini adalah mereka yang sedang bersekolah atau sedang mengejar karir. Di satu sisi, dari 500 kuesioner yang dibagikan, hanya 3 responden yang berada pada kelompok usia di bawah 17 tahun (0,6%) dan ini valid atau memenuhi kriteria penelitian, karena berdasarkan tingkat pengetahuan untuk menjawab pertanyaan tim yang diajukan dan latar belakang pendidikan atau pemahaman Responden menentukan arah penelitian ini. Selain itu, 26,6% dan 26,8% berada pada kelompok usia 17-25 tahun dan 26-35 tahun dikatakan sebagai

'zaman keemasan' seseorang dalam pembangunan peningkatan kesejahteraan. Setidaknya, responden dominan memiliki pengalaman bekerja dengan lulusan tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 53,4% (267 sampel) dan tidak bersekolah hanya 14 sampel atau 2,8% dari total sebaran 500. Hanya beberapa informan yang mencapai atau mengambil pendidikan master (lulus dari universitas).

Tabel 1 juga mengungkapkan informan berdasarkan status perkawinan, di mana sebagian besar dari mereka sudah menikah atau sekitar 61,8% atau 309 informan. Sedangkan sisanya belum menikah (33,4%), bercerai (3%), dan bercerai (1,8%). Hal ini tentu menjadi beban hidup bagi mereka yang sudah berkeluarga. Selama ini, tampaknya informan yang memiliki keluarga semakin sulit untuk berbagi pendapatan atau pemasukan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, apalagi ada juga yang tidak lagi bekerja atau hanya mengandalkan upah harian.

Tabel 1: Demografi responden (N = 500)

Aspek	Frekuensi	Untukcentage
<i>Kecamatan</i>		
North Bontang	228	45.6
South Bontang	184	36.8
West Bontang	88	17.6
<i>Jenis kelamin</i>		
Satu	265	53
Perempuan	235	47
<i>Kelompok umur</i>		
<17	3	0.6
17 – 25	152	30.4
26 – 35	133	26.6
36 – 45	134	26.8
46 – 55	49	9.8
> 55	29	5.8
<i>Latar belakang pendidikan</i>		
Tidak di sekolah	14	2.8
SD/MI	24	4.8

SMP/MTS	44	8.8
SMA/SMK/MA	267	53.4
DI/DII/DIII	39	7.8
DIV/S1	107	21.4
S2	5	1
	<i>Keadaan</i>	
Menikah	309	61.8
Satu	167	33.4
Cerai	15	3
Perceraian maut	9	1.8

Source: kreasi oleh penulis (2022).

Sebagai informasi tambahan, sejak kemunculannya terdeteksi di China, COVID-19 telah menjadi perhatian publik pada awal 2020. Kematian ribuan orang akibat virus ini menjadikannya pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi ini terbukti memberikan hambatan secara global, termasuk di Indonesia. Pola perekonomian yang selama ini berjalan selama ini tiba-tiba turun tajam pada konsumsi, distribusi, dan produksi (Darma & Darma, 2020). Karena itu, pemerintah segera mengambil langkah agresif untuk menekan jumlah spread maksimum.

Survei yang melibatkan kategori yang cukup penting untuk disampaikan, dengan mempertimbangkan sejauh mana tanggung jawab informan, seberapa besar bebannya, dan langkah atau strategi apa yang dapat menghadapi lesunya perekonomian di Kota Bontang, bahkan dalam skala nasional maupun global. Wawancara ini telah dilakukan secara terbuka dan mendapat persetujuan resmi dari tim peneliti untuk diberikan izin oleh Pemerintah Kota Bontang .

Kajian dengan teknik survei memiliki konsekuensi yang menjadi tanggung jawab tim peneliti. Memang, sulit untuk mendapatkan data yang ditargetkan. Terlebih lagi, kami menemui kendala yang signifikan, yaitu dalam konteks pencegahan COVID-19. Ada keterbatasan dan kesenjangan waktu untuk pengumpulan data, yang menjadi kendala tersendiri. Untuk itu, demi kelengkapan dan integritas penyajian data juga dilengkapi tim dengan alat perekam dan selama sesi wawancara dapat diterapkan melalui daring (zoom meeting).

4.2. Respons dan perilaku

Pada bagian ini, terdapat tanggapan berdasarkan persepsi yang diungkapkan oleh responden terhadap pertanyaan yang telah disusun peneliti. Urgensi perilaku responden selama

masa COVID-19 hingga saat ini, akan terlihat sejauh mana respon mereka ketika kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diterapkan serta saat kebijakan pemerintah 'new normal' diterapkan yang telah berlangsung cukup lama. Tidak ada referensi, misalnya, dengan menggunakan skala tertentu (misalnya Likert), tetapi tim lebih disesuaikan dengan item yang diarahkan pada setiap pertanyaan. Salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi risiko penularan massal virus menular ini awalnya berdasarkan PSBB yang tertuang dalam dokumen 'Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020' pada 31 Maret 2020 oleh Presiden Indonesia. Setelah itu, karena pertimbangan ekonomi dan faktor kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah, ada sedikit kelonggaran melalui kebijakan 'new normal' yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang 'Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Dinas dan Industri' dalam mendukung keberlangsungan usaha dalam situasi pandemi perlu ada implementasi konkret dengan melibatkan pemerintah di tingkat II (Kabupaten/Kota) untuk bersama-sama memperhatikan protokol kesehatan.

Dari *Tabel 2* dapat dilihat bahwa esensi dari 'era new normal' yang terjadi di Kota Bontang dan bagaimana mereka menyikapinya. Alhasil, sebagian besar informan tentu memahami 'new normal' dan tetap bekerja atau beraktivitas di luar, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan. Bagi yang bekerja di swasta, tentu tidak semua bekerja di luar ruangan, hanya untuk tenaga teknis seperti UPTD atau memang pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan atau menggunakan teknologi. Namun, bagi sebagian pegawai pemerintah yang meja kerjanya berbasis administrasi, tentunya harus menekankan pada pemanfaatan informasi digital, dimana pelayanan birokrasi kepada masyarakat dapat dibantu oleh teknologi yang sengaja dirancang agar tidak bertatap muka. Selain itu, layanan dengan sistem pendukung, tentunya memudahkan dari segi waktu, biaya, dan tenaga, seperti pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga (family card), dan formulir atau hal-hal yang dapat diakses secara online. Hal ini tentu membantu masyarakat dan roda pemerintahan. Hal ini juga mirip dengan skema pembelajaran daring yang menekankan guru dan dosen di sekolah hingga tingkat universitas untuk bersama-sama menggunakan jaringan yang terkoneksi melalui handphone atau komputer yang sudah terkoneksi dengan internet. Ilmi et al. (2020) menjelaskan bahwa di era revolusi industri 4.0, bukan hanya pendidikan yang terbantu, tetapi sektor jasa oleh pemerintah dan perusahaan sangat ditentukan oleh kecanggihan teknologi.

Selama menerapkan 'new normal' atau skema seperti sebelumnya, responden COVID-19 sangat memahami bahwa kondisi dalam beraktivitas perlu diwaspadai dengan menerapkan

protokol kesehatan yang ada. Mereka yang bekerja di berbagai bidang tentunya harus mematuhi peraturan yang telah dibuat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Informan juga harus memberikan contoh yang baik bagi penduduk sipil dengan sikap di tempat kerja. Mengacu pada *Tabel 2*, dominan mengatakan 'ya' untuk terus bekerja seperti biasa selama 'new normal'. Namun, 48,4% responden juga selalu tertib dan tetap waspada dengan kebijakan pembatasan jam kerja dan work from home (WFH) atau dapat bertemu dari kantor atau rumah melalui online tergantung pada tingkat intensitas pekerjaan itu sendiri. Jika tidak mendesak, maka peralatan online dapat diterapkan, tetapi jika mendesak dan harus datang ke kantor, mereka juga dapat melaksanakannya melalui '5M' seperti yang dijelaskan pada sesi sebelumnya. Selebihnya, beberapa responden berpikir bahwa kadang-kadang atau sekitar 35,6% berpikir bahwa bagian dari pekerjaan juga dapat dibagi menggunakan sistem yang disediakan oleh kantor. Ada juga yang mengatakan "tidak" mau mengambil risiko untuk melakukan aktivitas seperti sebelum COVID-19 melanda, karena aspek keselamatan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya menjadi acuan sekaligus skala di Kota Bontang di "zona merah" penularan pandemi ini. Itu semua tergantung pada fenomena dan kebutuhan responden yang mempertimbangkan apakah ketika mereka meninggalkan rumah itu perlu, seperti membeli kebutuhan primer atau hal-hal lain yang mendesak dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.

Tentu saja, semua elemen berharap masa sulit ini akan segera berakhir. Guncangan sejati COVID-19 telah menjadi 'tren' yang tidak dapat dilupakan sampai suatu hari nanti. Meski begitu, 217 responden sangat yakin bahwa situasi ini akan segera berakhir. Ada juga yang berpikir mereka "tidak tahu" kapan epidemi global ini akan berakhir. Sebanyak 283 responden pasrah dan pasrah sepenuhnya pada takdir Tuhan dengan memberikan motivasi dan kepercayaan penuh kepada manusia yang dapat menyelesaikan tantangan ini. Karena bukan tidak mungkin, setiap masalah pasti ada solusinya, sehingga lama kelamaan akan terselesaikan. Memang prediksi terbaru dari WHO (2021) bahwa virus ini akan segera berakhir dalam 2-3 periode, namun itu semua tergantung kebijakan masing-masing negara. Mereka juga yang dapat memantau dan melacak sejauh mana responsnya. Setidaknya, prioritas melalui vaksin kepada orang-orang yang berada di 'garis depan' seperti dunia medis, tentara, polisi, pegawai pemerintah, guru, hingga mereka yang rentan menular, tetap dipertimbangkan. Pencegahan dari segala arah telah diterapkan dan meminimalisir risiko infeksi, sehingga tidak ada lagi korban.

Tabel 2: Asumsi responden (N = 500)

Jawaban	Frekuensi	Untukcentage
<i>Menuju new normal</i>		
Mengerti	478	95.6
Tidak benar-benar mengerti	22	4.4
<i>Saat new normal</i>		
Ya	248	48.4
Kadang-kadang	178	35.6
Tidak	80	16
<i>Akhir dari pandemi</i>		
Akan berakhir	217	43.4
Tidak tahu	283	56.6
<i>Penggunaan masker</i>		
Ya	460	92
Kadang-kadang	37	7.4
Tidak	3	0.6
<i>Mencuci tangan</i>		
Ya	448	89.6
Kadang-kadang	49	9.8
Tidak	3	0.6
<i>Jaga jarak</i>		
Ya	347	69.4
Kadang-kadang	145	29
Tidak	8	1.6
<i>Jauhi keramaian</i>		
Ya	364	72.8
Kadang-kadang	129	25.8
Tidak	7	1.4
<i>Kurangi perjalanan</i>		
Ya	408	81.6
Kadang-kadang	76	15.2

Tidak	16	3.2
<i>Perasaan tentang pandemi</i>		
Bosan	374	74.8
Kadang-kadang	111	22.2
Tidak jenuh	15	3
<i>Sikap terhadap vaksinasi</i>		
Setuju	323	64.6
Bimbang	148	29.6
Tidak setuju	29	5.8
<i>Kesiapan vaksin</i>		
Bersedia	369	73.8
Tidak mau	131	26.2

Source: kreasi oleh penulis (2022).

Untuk menerapkan salah satu bagian dari perlindungan kesehatan (penggunaan masker), responden cenderung telah mematuhi. Apa yang juga terlihat pada *Tabel 2*, tergambar jelas bahwa jika 460 responden dari 500 sampel di antaranya, ada 92% yang selalu sadar virus ini untuk selalu memakai masker. Sisanya juga 0,6% sisanya yang sengaja tidak menggunakan masker, bukan karena tidak peduli (cuek) dengan pandemi ini, namun ada faktor kesehatan yang menjadi alasannya. Ke-3 orang tersebut juga tidak mau mematuhi perlindungan kesehatan yang ada, karena mereka memiliki riwayat asma (masalah pernapasan) yang jika menggunakan masker hanya sedikit oksigen yang bisa masuk ke paru-paru dan seorang spesialis telah berkonsultasi hal ini. Tentunya akan sangat berbahaya bagi penderita dengan latar belakang penyakit ini jika kandungan oksigen minimum yang dapat dihirup sangat kecil dan akan mengganggu saluran pernapasan yang diaktifkan saat memakai masker (terutama jika berada di ruangan kedap udara atau lembab). Jawaban 'terkadang' juga diberikan oleh 37 responden dengan alasan tergantung situasi dan kondisi. Jika mereka bekerja di ruangan tertentu dengan staf minimal atau WFH, mereka pasti tidak membutuhkan masker karena jika berpidato saat meeting online, maka akan dianggap tidak sopan memakai masker. Selain itu, setelah pulang kerja dan di rumah, mereka tentu tidak memakai masker karena menyesuaikan dengan situasi dan semua responden harus mandi dan segera mencuci pakaian kerjanya untuk mengurangi risiko penularan.

Peran kedua adalah 'mencuci tangan', di mana tingkat kesadaran responden selama ini sangat sadar untuk melakukan itu. Sisanya, ada 52 responden yang berpikir mereka kadang-kadang mencuci tangan dan tidak sama sekali. Ini tidak berarti bahwa 10,4% dari mereka tidak mau mematuhi jaminan kesehatan. Namun, 'terkadang' atau 'tidak' berarti beberapa dari mereka membawa peralatan seperti hand sanitizer (cairan atau semprotan) yang telah mereka siapkan sendiri. Karena fasilitas cuci tangan yang disediakan di kantor, tempat perbelanjaan, pasar, dan lainnya terkadang menimbulkan kerumunan. Orang-orang berdesakan untuk mengantri mencuci tangan di tempat-tempat tertentu. Ada yang kehabisan air bahkan sabun, sehingga hand sanitizer praktis dibawa kemana saja dan kapan saja.

Sorotan ketiga adalah 'menjaga jarak', yang akan menentukan penularan COVID-19. Perlu diketahui, untuk kehidupan sehari-hari, 69,4% responden telah menerapkan protokol dengan menjaga jarak dengan orang lain. Menariknya, terungkap bahwa ada 30,6% yang kadang-kadang menyatakan dan tidak. Ancaman keempat adalah 'jauhi kerumunan'. Kelemahan manusia yang sekaligus tidak lepas dari makna hidup yang sebenarnya adalah 'manusia adalah makhluk sosial'. Bukan berarti buruk atau tidak perlu, tetapi situasinya tidak mendukungnya saat ini, yaitu melakukan komunikasi atau kontak yang erat. Dalam konteks pencegahan, menjauhi kerumunan dianggap sesuatu yang tepat. Sebagai informasi dari tim peneliti di lapangan, setidaknya ada banyak tanggapan yang memahami makna tersebut. Sisanya, 129 responden menyatakan bahwa mereka 'kadang-kadang' tidak menghubungi orang lain dan 1,4% sisanya 'tidak sama sekali' memperhatikan kerumunan yang sangat besar. Hal ini tentu saja sangat sulit untuk diterapkan, karena faktor 'humanis' individu terhadap individu lain merupakan pola dan kebiasaan yang selama ini dijalani umat manusia dalam past.

Kesenjangan lainnya adalah 'mengurangi perjalanan' sangat tepat untuk mencegah penularan pandemi. Catatan khusus, sebagai poin terakhir dalam '5M' dan konsep bahwa respons harus dipraktikkan untuk selalu waspada terhadap bahaya virus ini. Contoh yang dapat menggambarkan fenomena dan tantangan saat ini adalah bagaimana 'mobilitas' seseorang dapat dikurangi, setidaknya. Temuan tim peneliti didasarkan pada eksplorasi, di mana masih ada responden yang 'kadang-kadang' atau bahkan 'tidak' dapat mengurangi mobilitas mereka sama sekali sebagai bagian dari 'makna kemajuan'. Namun, 81,6% berpikir mereka bisa menerapkan konsep kelima ini.

Manusia memiliki perasaan tertentu untuk menggambarkan kondisi psikologis mereka terhadap subjek dan objek tertentu. Pengalaman individu ketika mengalami stres kerja, bosan dengan hal-hal yang dianggap membosankan, dan perlunya perubahan signifikan di lingkungan sekitar dapat menentukan psikologi mereka untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan manusia lain. Romadhoni et al. (2015) dari temuan yang relevan untuk menyiratkan fenomena 'burn out', yang sekarang populer kembali dibahas oleh para peneliti atau ilmuwan, sebenarnya telah dibahas. Adalah wajar bagi karakter individu untuk mengekspresikan apa yang dialami they dalam kehidupan sehari-hari.

Tanggapan informan terhadap hal ini juga menilai perasaan mereka berdasarkan 3 kelompok (jenuh, kadang-kadang, dan tidak). Umumnya, mereka mengungkapkan pandemi COVID-19 yang telah berjalan selama 2 periode ini dengan 'kejenuhan'. Artinya, ada 74,8% responden yang tentunya merasa cemas dengan kondisi yang tidak dapat diketahui dan pasrah dengan bagaimana kelanjutannya. Selain itu, 22,2% beranggapan bahwa 'terkadang' kondisi psikologis ini muncul seketika dan hanya pada waktu-waktu tertentu dan mereka yang menjawab dengan 'tidak jenuh' hanya dipertimbangkan oleh 15 responden karena sudah terbiasa WFH atau sendirian dalam pekerjaan tertentu.

Langkah jitu yang diharapkan dapat mengurangi kecemasan responden adalah kedatangan 'vaksin COVID-19 ', sehingga tim peneliti memasukkan indikator-indikator ini dan meninjau apakah mereka bersedia dan sejauh mana sikap mereka. Sikap 'menyetujui' vaksin berjenis 'Sinovac' yang dipesan di Inggris pada 2020 silam dan didistribusikan pada waktu atau tahap yang dijadwalkan, dapat meyakinkan 323 responden (64,6%). Menariknya, masih ada 29,6% dari 'undecided' (148 responden) dan 29 responden, atau 5,8% dari mereka yang 'tidak setuju'. Alasan di balik dua jawaban ini adalah karena mereka menunggu giliran beberapa pihak yang sudah divaksin terlebih dahulu, kemudian memutuskan untuk 'menyetujui' vaksin, sehingga keraguan responden bisa berkurang. Ada juga yang tidak setuju, karena informasi yang beredar dari mulut ke mulut dan media sosial mempengaruhi keputusan mereka. Tentu saja, setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensinya sendiri. Ada hal-hal yang harus disosialisasikan pemerintah, sehingga membuka wawasan tambahan ke semua elemen.

Dari kesediaan responden untuk vaksin, tidak bisa dipaksakan begitu saja. Setiap penduduk di Indonesia memiliki 'Hak Asasi Manusia' yang sama, serta kewajiban dalam rangka melindungi seluruh bangsa dan tanah air. Selama masa observasi, tim peneliti menyimpulkan bahwa masih

ada beberapa yang 'tidak mau', yaitu 131 responden (26,2%) dan sisanya (369 responden) atau 73,8% dari pengamatan terhadap 500 sampel yang merasa siap atau 'bersedia' jika sudah divaksin.

4. 3. Tekanan ekonomi

Alasan ekonomi tentu menjadi sorotan dan pertimbangan bagi tim peneliti untuk melihat sejauh mana dampak COVID-19 terhadap permasalahan ekonomi masyarakat Kota Bontang dari mikroskop.

Bahkan, tim menemukan beberapa responden menyatakan bahwa 96% masih 'masih bekerja' dan sisanya diklasifikasikan sebagai 'masih bekerja, tetapi untuk sementara masih dirumahkan' (7%), dan 2,6% dari total 500 responden mengira mereka telah dirumahkan oleh kantor atau tempat usaha. Fokus kami, tentu saja, mereka yang bekerja paruh waktu (sementara) atau yang telah diberhentikan. Sebab, masih ada 4% atau 20 responden yang mengalami kesulitan karena penurunan omzet perusahaan (usaha usaha) di sektor tertentu, seperti perdagangan kecil dan menengah dan UMKM (lihat Tabel 3).

Sejak kebijakan 'PSBB' diterapkan, mau tidak mau beberapa kantor atau perusahaan pemerintah sudah mengikuti aturan tersebut. Namun, karena sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan swasta, maka tidak memungkinkan untuk melakukan 'Work from Home (WfH)'. Hal ini berbeda dengan fakta bahwa hanya sedikit informan atau sekitar 4,4% dari mereka yang selalu bekerja dari rumah, karena mereka adalah orang-orang yang telah menempati posisi, struktur, atau kelas tertinggi di lembaga atau kantor mereka, sehingga responden seperti ini hanya fokus pada koordinasi dengan bawahan dan mengendalikan kinerja karyawan mereka dari layar. Ada juga 55,6% dari orang yang diwawancarai yang bekerja seperti biasa dan beberapa menerapkan beberapa untuk pergi ke kantor, membatasi jam kerja, dan bergiliran dengan karyawan lain (shift-work) untuk menerapkan protokol. Ada 200 responden atau 40% dari total jumlah yang tidak mengizinkan 'WfH' karena pekerjaannya yang sangat teknis dan tidak bisa diwakilkan, seperti karyawan PLN, karyawan PDAM, buruh tani, dan pedagang kecil, atau pekerja konstruksi yang hanya mengandalkan upah harian.

Berdasarkan pekerjaan pokok responden, dari 500 di antaranya, dominan berasal dari karyawan swasta yang sudah lama bekerja di perusahaan (49%). Bidang pekerjaan kedua yang

paling umum adalah sebagai wirausahawan atau mereka yang bekerja untuk orang lain atau wiraswasta dan dibantu oleh karyawan untuk bekerja dengan upah harian dan bulanan sebesar 15,2%. Di satu sisi, hanya beberapa responden dengan riwayat pekerjaan sebagai dokter/bidan/perawat/apoteker yang sebesar 1,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikitnya tenaga kesehatan di Kota Bontang. Untuk mencegah COVID-19 yang membutuhkan banyak tenaga medis (mengingat jumlah penularan yang semakin meningkat) yang membutuhkan penanganan cepat. Disimpulkan bahwa responden memiliki latar belakang pekerjaan yang cukup beragam, dan ini memberikan sinyal kemampuan kesejahteraan umum atau pendapatan per kapita mereka. Mengacu pada penetapan Upah Minimum (UMK) tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. Sebanyak 3.182.706, sebenarnya mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya, tepatnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.933.099 (Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2020). Dampak ini mempengaruhi respon responden, yang menjelaskan bahwa sebagian besar pendapatan bulanan antara Rp. 2.000.000 – Rp. 3.500.000 atau 175 responden (35%), sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Sementara itu, hanya sedikit dari mereka yang berpenghasilan rendah (<Rp. 500.000), where ada 9,6% atau 48 orang.

Sejauh ini, belum ada dampak nyata COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan responden. Namun, hal ini perlu diwaspadai karena virus global ini kemungkinan akan bertahan lama dan perlahan dapat menurunkan perekonomian semua sektor. Diketahui ada respons informan yang menyatakan 'pendapatan tetap' sebagai bagian dari penyebaran COVID-19, yakni 50,6%. Namun, 45% sisanya, mereka justru beranggapan bahwa pandemi telah mengurangi pendapatan mereka, karena mereka yang ada di sini termasuk dalam kelompok pekerja yang hanya mengandalkan upah/gaji harian.

Alasan kenaikan gaji mereka adalah karena ada insentif khusus untuk tim COVID-19 dan banyak juga yang tidak mematuhi aturan, sehingga ada persepsi dari sebagian orang bahwa sekarang ada 'new normal' dan menganggapnya seperti biasa. Fenomena penurunan pendapatan adalah karena, seperti diketahui di berbagai negara dan wilayah, sejauh ini pekerjaan telah menurun dan sulit untuk mencari pekerjaan. Ada juga penutupan jalan untuk mengurangi penyebaran angka positif COVID-19 dan banyak penjualan yang menurun.

Sementara itu, toko-toko semakin sepi, dan lebih banyak orang memilih untuk tinggal di rumah. Ada juga pendapat bahwa jika memberhentikan mereka, akan sulit untuk mencari pekerjaan. Faktor lainnya adalah semakin banyak masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan,

tidak ada komisi, beberapa tunjangan dihapus, UMK tidak bertambah, kerumunan berkurang, takut keluar rumah, banyak kegiatan tidak bisa offline, anak-anak sekolah BDR (bisa datang dari rumah), cuaca tidak mendukung, usaha kebun tutup sementara, jam kerja dan jam kerja dibatasi, jarang datang bekerja, jarang menerima pesanan, orang mencuci diri di rumah, sehingga bisnis laundry sepi, orang tua minim partisipasi untuk membayar administrasi sekolah (padahal pekerjaannya PNS), nyawatoek tidak dijual, dan sebagainya.

Dari 22 responden yang mengalami kenaikan pendapatan, paling banyak mengalami kenaikan pendapatan kurang dari 25%, hanya 1 responden yang mengalami kenaikan 75% hingga 100% dan tidak ada responden yang pendapatannya meningkat 100%. Tabel 3 juga menyoroti 225 responden yang mengalami penurunan pendapatan, terbanyak (81 responden) mengalami penurunan pendapatan antara 50% hingga 75%, kemudian 69 responden mengalami penurunan 25% hingga 50% dan terdapat 8 responden yang mengalami penurunan pendapatan 100% atau lebih.

Dari 500 responden, dipastikan bahwa 297 responden (59,4%) telah menerima bantuan sosial dari pemerintah atau perusahaan dan 203 responden (40,6%) belum pernah menerima bantuan. Jenis bantuan yang diterima adalah: bantuan sembako (128 responden), bantuan sosial tunai (21 responden), bantuan langsung tunai (BLT) dari 91 responden, subsidi listrik (13 responden), kartu pra kerja (28 responden), subsidi gaji karyawan (24 responden), BLT usaha mikro dan kecil (26 responden), Corporate Social Responsibility (CSR) 8 responden dari perusahaan seperti PKT dan PLN, dan lainnya ada 17 responden yang sama-sama menerima masker, subsidi PDAM, BPJS employment, vitamin, dan PKH.

Perubahan perilaku konsumen secara umum dalam memaknai COVID-19 ditunjukkan dengan transformasi konsumsi yang semula belanja seperti biasa, kini dilakukan secara online. Karena kebanyakan dari mereka bekerja dan melakukan aktivitas di rumah, tidak ada salahnya untuk sementara waktu mencegah penularan COVID-19, kemudian beralih ke sistem online, termasuk memesan barang dan peralatan atau kebutuhan rumah tangga melalui situs-situs terkemuka seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dilaporkan ada peningkatan sebesar 18,8% atau 94 responden dari total (500 responden) yang lebih memilih berbelanja online. Namun, bagi yang belum pernah, 25,6% di antaranya memilih berbelanja seperti biasa karena ada kebutuhan khusus dan mendesak, seperti sayur dan sembako yang lebih enak, langsung ke pasar dan pastinya lebih segar daripada online. Selain itu, ada juga yang terus berbelanja seperti waktu normal, sekitar

37,8% responden juga melakukan aktivitas belanja seperti biasa karena menganggap waktu, tenaga, dan biaya lebih efisien dan efektif.

Tabel 3: Akses ekonomi (N = 500)

Jawaban	Frekuensi	Persentase
<i>Status pekerjaan</i>		
Ya, kerja	480	96
Ya, bekerja tapi sementara di rumah	7	1.4
Tidak, saya hanya dirumahkan karena kantor/tempat usaha ditutup	13	2.6
<i>WFH</i>		
Selalu bekerja dari rumah sejak WFH	22	4.4
Masih ada jadwal untuk masuk kantor	128	25.6
Bekerja seperti biasa	150	30
Tidak mengizinkan WFH	200	40
<i>Profesi</i>		
Dosen dan guru	14	2.8
Pegawai pemerintah, polisi dan tentara	40	8
Trader	15	3
Petani (pekebun)	13	2.6
Nelayan	15	3
Karyawan perusahaan s	245	49
BUMN/BUMD employees	24	4.8
Pegawai kehormatan	9	1.8
Pekerja	25	5
Dokter/bidan/perawat/apoteker	7	1.4
Wiraswasta	76	15.2
Lain	17	3.4
<i>Pendapatan</i>		
<500.000	48	9.6
500.000 - 2.000.000	129	25.8

2.000.000 - 3.500.000	175	35
3.500.000 - 5.000.000	77	15.4
>5.000.000	71	14.2

Dampak COVID-19 terhadap pendapatan

Tambah	22	4.4
Konstan	253	50
Kurang	225	45

Persentase peningkatan pendapatan

<25%	12
25% - <50%	6
50% - <75%	3
75% - <100%	1
≥100%	0

Persentase penurunan pendapatan

<25%	47
25% - <50%	69
50% - <75%	81
75% - <100%	20
≥100%	8

Status penerima bansos

Terima	297	59.4
Jangan terima	203	40.6

Aktivitas belanja online

Tidak pernah	128	25.6
Tambah	94	18.8
Konstan	189	37.8
Kurang	89	17.8

Peningkatan belanja online

<25%	46
25% - <50%	26
50% - <75%	13

75% - <100%
>100%

5
4

Kurangid belanja online

<25%
25% - <50%
50% - <75%
75% - <100%
>100%

49
13
15
11
1

Pengeluaran untuk bahan makanan

Tambah
Konstan
Kurang

167
258
75

33.4
51.6
15

Pengeluaran untuk makanan/minuman siap saji

Tambah
Konstan
Kurang

155
260
85

31.2
51.8
17

Pengeluaran untuk kesehatan

Tambah
Konstan
Kurang

276
192
32

55.2
38.4
6.4

Pengeluaran untuk listrik

Tambah
Konstan
Kurang

157
313
30

31.4
62.6
6

Biaya pulsa dan paket data

Tambah
Konstan
Kurang

265
206
29

53
41.2
5.8

Pengeluaran untuk bahan bakar minyak

Tambah
Konstan

58
341

11.6
68.2

Source: kreasi oleh penulis (2022).

Sangat menarik untuk menggambarkan persentase kenaikan dan persentase penurunan belanja online responden dibandingkan dengan waktu normal seperti biasa. Secara spesifik, kurang dari 25% di antaranya (dari 94 responden) mengalami peningkatan dan 46 orang ini merasa memang tidak ada tambahan kuota konsumsi mengingat hal tersebut sejalan dengan pendapatan mereka yang juga tidak bertambah sejak pandemi ini melanda. Serupa dengan peningkatan tersebut, ada juga penurunan belanja online oleh 49 responden (<25%) yang berpikir bahwa intensitas belanja menurunkantingkat kesejahteraan yang dinamis.

Sebanyak 167 responden (33,4%) dengan peningkatan pengeluaran bahan pangan (sembako, sayuran, lauk raw) selama pandemi, 75 responden (15%) menurun dan 258 responden tetap (51,6%).

Dari 500 responden, terdapat 167 responden (33,4%) dengan peningkatan pengeluaran bahan makanan (sembako, sayuran, lauk raw) selama pandemi, 75 responden (15%) menurun dan 258 responden tetap (51,6%). Sementara itu, pengeluaran responden untuk jenis makanan dan minuman siap saji, terdapat 55 responden (31,2%) dengan peningkatan pengeluaran untuk makanan/minuman siap saji selama pandemi, 85 responden (17%) menurun dan 260 responden tetap (51,8%).

Masyarakat juga mengikuti desakan dari Pemerintah untuk menekan penularan COVID-19 melalui kesadaran masing-masing. Sebagai informasi pendukung, dijelaskan bahwa telah terjadi peningkatan drastis pengeluaran di bidang kesehatan, seperti obat-obatan, vitamin, dan sanitasi. Pandemi global telah mempengaruhi perilaku individu, setidaknya untuk diharapkan melalui motif dan tindakan pencegahan dengan peralatan kesehatan rumah tangga.

Selain transformasi belanja di sektor kesehatan, responden juga memiliki kecenderungan untuk meningkatkan belanja listrik. Terlihat adanya tambahan konsumsi listrik sebesar 31,4%. Dari jumlah 500 unit responden, ada juga yang berasumsi bahwa jenis pengeluaran ini tetap (62,6%) dan sisanya justru menurun (6%). Bagi mereka yang bekerja dari rumah, sebenarnya ada tren boros untuk menghabiskan listrik. Bagaimana tidak, bekerja dari rumah juga membutuhkan biaya internet atau paket data untuk ponsel pintar yang tidak kalah dengan sebelum COVID-19.

Pengeluaran dari kredit juga tampaknya meningkat dari waktu ke waktu. Karena ada 265 responden (53%) di antaranya merasa perlu melakukan top up pulsa setiap saat dan koordinasi jarak jauh dengan rekan kerja atau karyawan lebih intensif. Secara otomatis, ini akan mengkonsumsi listrik untuk mengisi lebih banyak. Sisanya, ada 206 responden yang mengatakan tetap dan thdi sana menurun sekitar 5,8%.

Efek pandemi tampaknya tidak berpengaruh signifikan bagi mereka yang tetap melakukan aktivitas seperti bekerja di luar rumah, karena ada 341 responden yang merespon pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) secara konstan dan tetap. Sementara itu, 101 responden menilai mengalami penurunan karena mereka yang berada di sini tergolong pekerja yang hanya bekerja dari rumah.

4.4. Pilar Lainnya

Untuk transportasi umum, termasuk responden online beralasan tetap sebagai pengguna (75,4%). Alasan COVID-19 tampaknya tidak berpengaruh signifikan pada mereka yang dianggap sebagai penggemar transportasi umum dan online. Hanya sedikit meningkat atau menurun, di mana tim peneliti menemukan bahwa sekitar 24,6% justru semakin intens dan beralih ke transportasi pribadi karena takut bertemu dengan orang banyak dan mengurangi aktivitas di luar ruangan seperti fasilitas umum, tempat perbelanjaan, dan sebagainya yang mengundang kerumunan. massa.

Tabel 4: Faktor-faktor lain

Jawaban	Frekuensi	Persentase
<i>Pengeluaran untuk transportasi umum</i>		
Tambah	41	8.2
Konstan	377	75.4
Kurang	82	16.4
<i>Riwayat terinfeksi COVID-19</i>		
Ya	43	8.6
Tidak	457	91.4

Source: kreasi oleh penulis (2022).

Pencarian kami berikutnya adalah bagaimana melihat perspektif responden tentang sejarah COVID-19. Hasilnya, identifikasi di lapangan hanya mengeksplorasi beberapa responden yang mengaku telah terpapar virus menular ini sebanyak 8,6%. Padahal, kejujuran sangat penting sebagai bagian dari keterbukaan informasi untuk mendukung program pemerintah daerah dalam upaya pencegahan infeksi. Mereka yang berpikir tidak sekitar 91,4%, karena belum pernah melakukan tracing melalui swab-test dan rapid antigen secara bertahap. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka tidak pernah terinfeksi berdasarkan hasil medis dan sisanya telah mengikuti rekomendasi pemerintah untuk vaksinasi. Pada Tabel 4 memeriksa mereka yang sudah divaksin, yakni responden yang berada di 'garis depan'. Termasuk di dalamnya berarti mereka dalam pekerjaan sebagai tenaga kesehatan, TNI, Polri, aparat pemerintah, guru, dan dosen.

KESIMPULAN

Hal inilah poin terakhir dalam kajian khusus ini, yang berfokus pada temuan beserta apa yang dapat diterapkan Pemerintah Kota Bontang sebagai langkah strategis dalam merespon kondisi sosial ekonomi di tengah musibah ini.

Memang, responden sangat memahami tentang bahaya dan tindakan pencegahan apa yang harus diterapkan, misalnya, dengan '5M' dan vaksinasi. Namun, yang menjadi fokus tim peneliti di lapangan adalah kondisi psikologis yang mengkhawatirkan jika COVID-19 tidak berakhir. Masalah ekonomi mungkin bukan satu-satunya penyebab kekacauan ini, tetapi memulihkan kesejahteraan psikologis individu tentu jauh lebih sulit. Mengingat pandemi global ini sudah berlangsung selama 2,5 tahun di berbagai negara (termasuk Indonesia), bukan tidak mungkin manusia kehilangan akal sehat dan kehabisan kesabaran, sehingga 'new normal' diterapkan tanpa instruksi resmi pemerintah. Tentu saja, ini adalah ancaman terbesar bagi umat manusia, mengingat kerumunan massa adalah biang keladi tingginya penularan virus.

Selain upaya tambahan yang difokuskan pada pemerintah, pihaknya membuat rekomendasi untuk studi masa depan yang perlu mempertimbangkan ukuran sampel dan target responden. Sebab, tidak semua daerah, baik itu di tingkat nasional maupun skala daerah, memiliki karakteristik yang sama, tetapi studi kasus efek sosial yang berbeda sejak munculnya COVID-19. Ada perhatian khusus dan pemahaman mendalam, juga difokuskan pada penggunaan analisis data techniques, untuk menghasilkan temuan yang bervariasi.

Studi ini juga membuka jalan bagi implikasi teoritis di masa depan dan kontribusi akademis untuk terus menginspirasi, menyoroti, dan menganggap serius gagasan tentang apa yang paling tepat untuk membalikkan efek sosial-ekonomi dari pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S., Lestari, D., & Nurjanana, N. (2020). Perubahan konsumsi rumah tangga selama pandemi COVID-19: empiris dari Kota Samarinda, Indonesia. *Jurnal Internasional Rehabilitasi Psikososial*, 24(3), 5603-5614. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR2021161>
- Ayuningtyas, D., Haq, H. U., Utami, R., & Susilia, S. (2021). Mempertanyakan respons kebijakan publik pemerintah Indonesia terhadap pandemi COVID-19: analisis kotak hitam untuk periode Januari-Juli 2020. *Perbatasan dalam Kesehatan Masyarakat*, 9, 612994. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.612994>
- Bavel, J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Crockett, M. J., Crum, A. J., Douglas, K. M., Druckman, J. N., Drury, J., Dube, O., Ellemers, N., Finkel, E. J., Fowler, J. H., Gelfand, M., Han, S., Haslam, S. A., Jetten, J., Kitayama, S., ... Willer, R. (2020). Menggunakan ilmu sosial dan perilaku untuk mendukung respons pandemi COVID-19. *Perilaku Manusia Alam*, 4(5), 460–471. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>
- Bowen, G. (2009). Analisis dokumen sebagai metode penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Kualitatif*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Central Bureau of Statistics of Bontang City. (2020). *Kota Bontang dalam angka [Bontang City in numbers]*. Samarinda: Suvi Sejahtera.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2020). Analisis Provinsi Kalimantan Timur edisi terbaru 2020 [*Analisis Provinsi Kalimantan Timur edisi terbaru 2020*]. Diambil dari <https://kaltim.bps.go.id/publication/2020/12/28/e919ac148799b217be6dab93/analisis-isu-terkini-provinsi-kalimantan-timur-2020.html>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Kemiskinan dan ketimpangan [*Kemiskinan dan ketimpangan*]. Diambil dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Cooper, M. A., & Gordon, J. L. (2021). Memahami panic buying melalui lensa psikodinamik terintegrasi. *Perbatasan dalam Kesehatan Masyarakat*, 9, 666715. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.666715>
- Damanik, D. W., & Saragih, J. (2021). Konseling tentang COVID-19 dan pelaksanaan protokol kesehatan dengan 5M. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 1(1), 15–18. Retrieved from <https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakamitra/article/view/9>
- Darma, S., & Darma, D. C. (2020). Manajemen ketahanan pangan untuk Indonesia: strategi di masa pandemi COVID-19. *Dinamika Manajemen dalam Ekonomi Pengetahuan*, 8(4), 371-381. <https://doi.org/10.2478/mdke-2020-0024>
- Ilmi, Z., Darma, D. C., & Azis, M. (2020). Kemandirian dalam pembelajaran, manajemen pendidikan, dan industri 4.0: habitat Indonesia selama COVID-19. *Jurnal Antropologi Olahraga dan Pendidikan Jasmani*, 4(4), 63-66.
- Hazra A. (2017). Menggunakan interval kepercayaan dengan percaya diri. *Jurnal Penyakit Toraks*, 9(10), 4125–4130. <https://doi.org/10.21037/jtd.2017.09.14>

- Indah, A. V., & Muqsith, A. (2021). Panic buying: konsumerisme masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 perspektif psikoanalisis jacques lacan. *Jurnal Filsafat*, 31(1) 24–48. <https://doi.org/10.22146/jf.56722>
- Gandasari, D., & Dwidienawati, D. (2020). Analisis konten isu sosial dan ekonomi di Indonesia selama pandemi COVID-19. *Heliyon*, 6(11), e05599. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05599>
- Gujarati, D. N. (2012). *Ekonometrika dasar*. Noida: Pendidikan Tata McGraw-Hill.
- Mohsin, A., Hongzhen, L., & Hossain, S. F. A. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi konsumen: analisis penanggulangan. *SAGE Terbuka*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.1177/21582440211008875>
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Metode studi kasus: panduan langkah demi langkah untuk peneliti bisnis. *Jurnal Internasional Metode Kualitatif*, 18, 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>
- Romadhoni, L. C., Asmony, T., & Suryatni, M. (2015). Pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, dan dukungan sosial terhadap burnout pustakawan di Kota Mataram. *Khazanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 3(2), 125-145. <https://doi.org/10.24252/kah.v3i2a3>
- Roy, J., Hasid, Z., Lestari, D., Darma, D. C., & Kurniawan A, E. (2021). COVID-19 maneuver on socio-economic: exploitation using correlation. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 146-162. <https://doi.org/10.21009/JPEB.009.2.6>
- Saha, K., Torous, J., Caine, E. D., & De Choudhury, M. (2020). Efek psikososial dari pandemi COVID-19: studi kuasi-eksperimental skala besar di media sosial. *Jurnal Penelitian Internet Medis*, 22(11), e22600. <https://doi.org/10.2196/22600>
- Singh, G., Aiyub, A. S., Greig, T., Naidu, S., Sewak, A., & Sharma, S. (2021). Mengeksplorasi perilaku panic buying selama pandemi COVID-19: perspektif negara berkembang. *Jurnal Internasional Pasar Negara Berkembang, Vol. ahead-of-print*, No. di depan cetak. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-03-2021-0308>
- Snyder, H. (2019). Tinjauan pustaka sebagai metodologi penelitian: ikhtisar dan pedoman. *Jurnal Penelitian Bisnis*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tanjung, D., & Purnamadewi, Y. L. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap UMK dan koperasi serta pemulihan strategis di era new normal. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 12(3), 220-231. <https://doi.org/10.29244/jmo.v12i3.39197>
- Wang, Z., Zhang, Z., Zhang, Q., Gao, J., & Lin, W. (2021). COVID-19 dan respons pasar keuangan di Tiongkok: bukti mikro dan kemungkinan mekanisme. *PloS Satu*, 16(9), e0256879. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256879>
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2021). *Saran penyakit virus corona (COVID-19) untuk umum*. Diperoleh dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Panduan melakukan kajian pustaka yang sistematis. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Perencanaan*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yijo, S., Asnawati, A., Darma, S., Achmad, G. N., Arizandi, M. A., Hidayati, T., & Darma, D. C. (2021). Eksperimen sosial tentang masalah dari petani tomat selama COVID-19 - kasus Indonesia. *Jurnal SAR - Sains dan Penelitian*, 4(1), 7-13. <https://doi.org/10.18421/SAR41-02>

Yuhertiana, I., Zakaria, M., Suhartini, D., & Sukiswo, H. W. (2022). Ketahanan koperasi selama pandemi: Bukti Indonesia dan Malaysia. *Keberlanjutan*, 14(10), 5839. <https://doi.org/10.3390/su14105839>



FORMULIR REVIEW
Penelitian Dosen (Kelompok)
Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unmul

Kode Artikel : -
Judul : Pandemi COVID-19: Perubahan Perilaku Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kota Bontang
Ketua Peneliti : Juliansyah Roy*, Rahmad Budi Suharto, Eny Rochaida

INPUT	COMMENT
General Context	Abstrak dan kesimpulan bisa disesuaikan, bagian pendahuluan masih sangat sederhana belum menyakinkan problem ini layak di teliti
Research Problem	Secara umum riset ini belum menunjukkan fenomena mendasar yang menyebabkan riset ini menarik untuk di teliti baik secara empiris dan kajian penelitian ini
Specific Goal	Urgensi penelitian tidak sejalan dengan hasil yang dikemukakan pada abstrak
Literature Reviews	Kajian teoritis tidak konsisten dengan judul penelitian Perubahan Perilaku Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Methodology	Metodologi penelitian hanya fokus pada pengukuran sampel, tidak jelas proses dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian
Results and Discussion	Pembahasan hasil penelitian sudah komperensif, namun sebaiknya ditambahkan kajian empiris yang serupa
References	Penelitian ini sudah merujuk beberapa artikel yang update
Improvement Suggestions: latar belakang penelitian disesuaikan dengan judul; tinjauan	



teori di perdalam dan metodologi penelitian di tinjau kembali supaya betul betul menjawab tujuan penelitian.

Makassar, 12 Desember 2022
Reviewer,

(Dr. Madris, S.E. DPS., M.Si)

COVID-19 Pandemic: Changes in People's Social and Economic Behavior in Bontang City

Juliansyah Roy*, Rahcmad Budi Suharto, Eny Rochaida

Faculty of Economics and Business, Mulawarman University, Indonesia

*Corresponding author's: juliansyah.roy@feb.unmul.ac.id

The Corona virus outbreak (COVID-19) that has occurred in Indonesia since the beginning of March 2020 has forced most people to limit their activities. From all lines of micro, small, to cooperatives, the pandemic very affected them.

In Bontang City (East Kalimantan – Indonesia), the government is trying to make various efforts to reduce the impact of the corona virus by asking all parties to do social distancing. Work From Home (WFH) and decide to cancel teaching and learning activities. This policy will certainly impact changes in social and economic behavior of the community, especially in Bontang City. This research uses a social experimental approach to find out how much impact the COVID-19 has on changes in social and economic behavior in Bontang. It supported objectivity through a survey covering 500 units of respondents.

The results of the study show that the COVID-19 pandemic has impacted changes in people's social behavior, including: 1) respondents understand and are getting used to the new normal conditions in their activities although there is still hope for conditions to return to normal soon; 2) respondents have no difficulty in implementing the Health Protocol even though it is difficult to implement it in their daily activities; 3) respondents are tiring of the pandemic; 4) Most respondents agree and will participate in the COVID-19 vaccination program. Meanwhile, changes in economic behavior conclude that out of 500 respondents, there are 480 respondents (96%) who are still working and 7 respondents (1.4%) are working but temporarily laid off, were 55 respondents (31%) with increased expenditure on prepared food/beverages during the pandemic, 85 respondents (17%) decreased and 260 respondents remained (51.8%).

Keywords: COVID-19, behavior, social, economic; social experimental.

1. INTRODUCTION

Since its appearance was detected in Wuhan (China), COVID-19 has become a public concern in early 2020. The death of thousands of people because of this virus has made it the center of attention of many countries. This pandemic has proven to have provided obstacles globally, including in Indonesia (Damanik & Saragih, 2021). The pattern of the economy that had been running so far suddenly dropped sharply in consumption, distribution, and production (Mohsin et al., 2021; Wang et al., 2021). Because of this, the Indonesian government immediately took aggressive steps to reduce the spread rate to the maximum.

Given the need for refocusing on the 2021 Bontang City Budget with the aim of programs that support controlling, handling, recovering the COVID-19 and aligning planning documents with the pandemic situation, it is necessary to conduct an in-depth study of the sectors affected during the pandemic. COVID-19, so that the planning process and policy refocusing the budget on regional expenditures in handling the COVID-19 in Bontang City are right on target and useful.

People cannot eat and provide other necessities of life if they are constantly cooped up at home (Singh et al., 2021). Furthermore, hyper inflation due to economic turmoil can exacerbate the political, 'panic buying' and social conditions of people (Indah & Muqsith, 2021). As a result, eventually they will lose their jobs and be dragged into unemployment and closer to poverty (Cooper & Gordon, 2021).

The contribution and urgency of this study is to provide direction and recommendations in the context of a careful refocusing of 2021 planning and budgeting to support control, handling, and economic recovery and social reform during the COVID-19 pandemic.

The scope of the study includes two types, namely the collection of secondary data and primary data. Secondary data collection includes information on the conditions form of the people of Bontang City during the pandemic, especially the distribution and number of confirmed cases, active cases, and deaths. After that, there is information on current conditions related to welfare indicators, such as poverty rates, unemployment rates, education, health, purchasing power and other relevant indicators. The last is desk research by reviewing studies and documents relevant to the study to be carried out in order to perfect the concept and analysis (e.g. Snyder, 2019; Bowen, 2009; Xiao & Watson, 2017; Rashid et al., 2019).

The second is the collection of primary data through the Focus Group Discussion (FGD) progress at the Regional Apparatus level, especially for Regional Apparatuses that handle sectors affected by COVID-19. Regional apparatus involved in the FGDs included the Office of Social Affairs and Community Empowerment; Department of Education and Culture; Department of Cooperatives, SMEs and Trade; Department of Youth, Sports and Tourism; Labor offices; Department of Food Security, Fisheries and Agriculture; Public health Office; Department of Transportation; Taman Husada Hospital; Civil Service Unit; Regional Financial and Asset Management Agency; Planning, Research and Development Agency; Regional Disaster Management Agency; West Bontang District; South Bontang District' North Bontang District; PT. Pupuk Kaltim; PT. Badak LNG; and PT. Indominco Mandiri

In addition, in-depth interviews were applied to relevant Regional Apparatus/Agencies to get program information and program targets in prevention, handling, economic recovery and social reform during the COVID-19 pandemic, including planning, budgeting, implementing and evaluating programs has been executed. Survey to find out sectors affected by COVID-19 in Bontang City. Next, the researcher implemented data analysis, preparation of recommendations, and verification.

The principal summary of this study is compiled in several stages. The first point presents the introduction. Second, is a literature review. The third part covers the methodology, and the fourth is to present the results of the study. Last, the conclusions highlight the implications of the findings, recommendations, and future contributions.

2. REVIEW OF LITERATURE

2.1. The COVID-19

The COVID-19 pandemic is still ongoing and has yet to find a stopping point for its spread. So far, as of February 28, 2021, there have been 113,315,218 people in the world who have been confirmed positive for COVID-19, including 2,517,964 deaths. In Indonesia, the first case of COVID-19 was detected on March 2, 2020. And until February 28, 2021, there were 1,334,634 confirmed positive cases, including 36,166 deaths (WHO, 2021). In Bontang City itself there were 5111 positive confirmed cases of COVID-19 and 83 people died as of the update on February 28, 2021 (Central Bureau of Statistics of East Kalimantan, 2020).

The increase in the number of cases evenly throughout Indonesia has a negative impact on various sectors, especially the economy. The COVID-19 pandemic that has occurred in Indonesia since the beginning of March 2020 has forced most people to limit their activities so that it can prevent the spread of the virus. All lines of micro, small, and cooperative businesses are affected by the pandemic outbreak (Yuhertiana et al., 2022). Decreased sales, decreased capital, decreased orders, difficulty in raw materials, and bad credit (Tanjung & Purnamadewi, 2021). The economy suddenly collapsed in an instant.

In Indonesia, the government is trying to make various efforts to reduce the impact of the corona virus by asking all parties to carry out social distancing such as Work From Home (WFH) and deciding to cancel lectures and teaching and learning activities (Ayuningtyas et al., 2021). The government has actualized the Imposition of Restrictions on Micro-Scale Community Activities (PPKM-SM) as a replacement for PPKM, which lasted for almost a month in Java and Bali. It changed the policy after President Joko Widodo assessed PPKM was not effective in suppressing the surge in pandemic cases. PPKM and PPKM-SM have several significant differences. The policy is looser than PPKM for several corridors. However, even with the relaxation of the PPKM-SM policy, it could not increase public spending to stimulate a significant increase in the economy.

2.2. Government financial relaxation

The Central Government has prepared regulations or regulations including Government Regulation Number 1 of 2020 concerning 'State Financial Policy and Financial System Stability for Handling COVID-19', Presidential Decree Number 7 of 2020 concerning 'Task Force for the Acceleration of Handling COVID-19', Presidential

Regulation Number 52 of 2020 concerning 'Construction of Observation and Shelter Facilities in Combating COVID-19 or Emerging Infectious Diseases on Galang Island, Batam City, Riau Islands Province', Presidential Instruction Number 4 of 2020 concerning 'Refocusing Activities, Budget Reallocation, and Procurement of Goods and Services in Accelerating Handling of COVID-19', Presidential Regulation Number 21 of 2020 concerning 'Large-Scale Social Restrictions in Accelerating Handling of COVID-19' and Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning 'Determination of Public Health Emergency Status', and Instructions of the Minister of Home Affairs State Number 3 of 2021 concerning 'PPKM-SM'.

In dealing with the COVID-19 pandemic, the Central Government has also issued a policy of budget refocusing or centralization of the regional revenue and expenditure budget (APBD) as well as the reallocation process as outlined in the instructions of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 (Central Bureau of Statistics of Indonesia, 2020). The reallocation of the Regional Budget can be understood as a mechanism of change or change diverts the direction of the objectives of a budget policy that is used based on the needs related to the funding pattern in the policy.

3. METHODS AND DESIGN

3.1. Samples

We applied the study approach with a social experiment on how big the social impact of the COVID-19 pandemic was for the City of Bontang (e.g. Roy et al., 2021; Bavel et al., 2020; Gandasari & Dwidienawati, 2020; Yijo et al., 2021; Saha et al. al., 2020). It supported objectivity through an in-depth survey to the government covering 500 units of informants, where the interview time is 3 months (February–April 2022). Researchers are also assisted by several groups whose tasks it divided into several stages, such as observation, documentation, validation, and data processing.

The sample size is 500 samples, where the researcher uses a purposive sampling technique. It should be noted that this technique is very suitable for field data collection because researchers can know for sure the intended target informants, for example including their work background, field, domicile, and certain attributes with the right characteristics in describing the relationship of a study (Amalia et al., 2020).

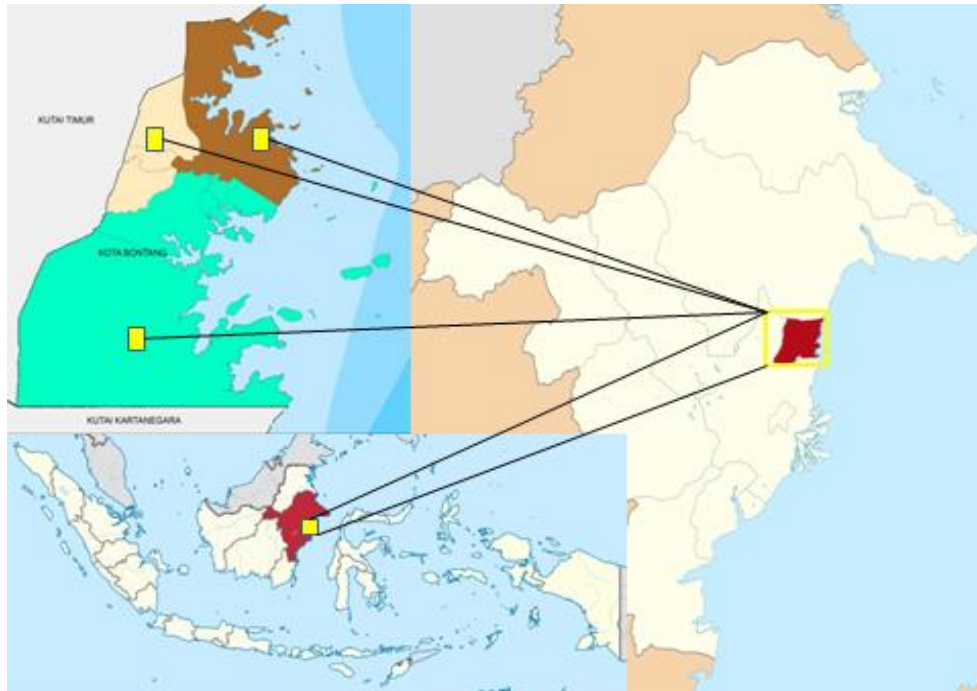


Figure 1: Focus and objectivity

Source: creations by the author (2022).

The feasibility of this study pattern is also determined by the distribution of the sample size with a minimum margin of error (margin of error) of 1%, so that the 99% confidence level can project the quality of the data (Hazra, 2017). With an error rate of 1%, the minimum number of samples is 475 (Gujarati, 2012) and we consider the use of 500 samples in this study to meet the criteria or is very adequate. The distribution of the sample distribution is summarized in *Figure 1*.

3.2. Design and demarcation

The logical reasons underlying the implementation time and the number of samples are quite limited, considering the situation and conditions during this global outbreak do not allow it to be applied in a long time span, so the research team must also pay attention to the '5 M' (washing hands, wearing masks, maintaining social distance), avoiding mass crowds, and reducing mobility) during the interview process. The focus of the study only focuses on 3 areas (Kecamatan), namely North Bontang, South Bontang, and West Bontang with the involvement of informants who work (private employees, government, and entrepreneurs) and those who do not work (schools and household workers).

3.3. Characteristics of respondents

The profiles of the respondents are presented in *Table 1*. As a result, those in the study area, specifically in Bontang City, represented each region. The distribution

of the questionnaire based on the District, apparently North Bontang explored more than the other 2 areas, where there were 228 samples or about 45.6% and the remaining 54.6% comprised South Bontang District (184 samples) and West Bontang District (88 samples).

For the distribution referring to gender, of the 500 samples, 265 respondents were male (53%) and the remaining 47% or 235 female respondents. There are those who are female, 6% fewer than those who are male. This also gives a signal that workers have felt, those who are classified as workers and are of productive age (15-64 years) are the heads of household compared to women.

Interviews were conducted targeting respondents of all ages who were grouped into 6 groups. The most visible are respondents in the age group of 17-25 years or in percentage it reaches 30.4%, because this age interval is those who are in school or college or are pursuing a career. On the one hand, out of 500 questionnaires distributed, only 3 respondents were in the age group under 17 years (0.6%) and this was valid or met the study criteria, because based on the level of knowledge to answer the team's questions asked and educational background or understanding Respondents determine the direction of this study. Furthermore, 26.6% and 26.8% are in the age group of 17-25 years and 26-35 years are said to be the 'golden age' of a person in the development of improving welfare.

We interviewed targeting respondents of all ages who were grouped into 6 groups. The most visible are respondents in the age group of 17-25 years or in percentage it reaches 30.4%, because this age interval is those who are in school or college or are pursuing a career. On the one hand, out of 500 questionnaires distributed, only 3 respondents were in the age group under 17 years (0.6%) and this was valid or met the study criteria, because based on the level of knowledge to answer the team's questions asked and educational background or understanding Respondents determine the direction of this study. Moreover, 26.6% and 26.8% are in the age group of 17-25 years and 26-35 years are said to be the 'golden age' of a person in the development of improving welfare. At least, the dominant respondents have experience working with SMA/SMK/MA level graduates as much as 53.4% (267 samples) and not attending school only 14 samples or 2.8% of the total distribution of 500. Only a few of the informants achieved or took a master's education (graduated from university).

Table 1 also reveals informants based on marital status, where most of them are married or around 61.8% or 309 informants. Meanwhile, the rest are unmarried (33.4%), divorced (3%), and divorced (1.8%). This is certainly a burden in life for those who are married. So far, it seems that informants who have families are finding it increasingly difficult to share their income or income for daily basic needs, moreover some are no longer working or relying only on daily wages.

Table 1: Demographics of respondents (N = 500)

Aspects	Frequency	Percentage
<i>Subdistrict</i>		
North Bontang	228	45.6
South Bontang	184	36.8
West Bontang	88	17.6
<i>Gender</i>		
Man	265	53
Female	235	47
<i>Age group</i>		
<17	3	0.6
17 - 25	152	30.4
26 - 35	133	26.6
36 - 45	134	26.8
46 - 55	49	9.8
> 55	29	5.8
<i>Educational background</i>		
Not in school	14	2.8
SD/MI	24	4.8
SMP/MTS	44	8.8
SMA/SMK/MA	267	53.4
DI/DII/DIII	39	7.8
DIV/S1	107	21.4
S2	5	1
<i>Status</i>		
Married	309	61.8
Single	167	33.4
Divorced	15	3
Death divorce	9	1.8

Source: creations by the author (2022).

As additional information, since its appearance was detected in China, COVID-19 has become a public concern in early 2020. The death of thousands of people due to this virus has made it the center of attention of many countries, including Indonesia. This pandemic has proven to have provided obstacles globally, including in Indonesia. The pattern of the economy that had been running so far suddenly fell sharply in consumption, distribution, and production (Darma & Darma, 2020). Because of this, the government immediately took aggressive steps to suppress the maximum number of spreads.

A survey involving categories that are important enough to be submitted, considering the extent of the informant's responsibilities, how big the burden, and what steps or strategies can deal with the sluggish economy in Bontang City, even on a national and global scale. This interview has been carried out openly and

received formal approval from the research team to be given permission by the previous Bontang City Government.

Studies with survey techniques have consequences which are the responsibility of the research team. Indeed, it is difficult to get targeted data. What's more, we encountered a significant obstacle, namely in the context of preventing COVID-19. There were limitations and the time gap for data collection, which became a separate obstacle. For this reason, for the sake of completeness and integrity of the data presentation, it also equipped the team with a recording device and during the interview session, it can be applied via online (zoom meeting).

4. RESULTS AND DISCUSSION

4.1. Response and behavior

In this section, there are responses based on the perceptions expressed by the respondents to the questions that the researcher has prepared. The urgency of the respondent's behavior during the COVID-19 period until now, will be seen the extent of their response when the PSBB (Large-Scale Social Restrictions) policy was implemented as well as when the 'new normal' government policy was implemented which had lasted for a while. There is no reference, for example, with the use of a certain scale (e.g. Likert), but the team is more adjusted to the items that are directed at each question. One of the government's strategies to reduce the risk of mass transmission of this infectious virus was initially based on the PSBB, which was stated in the document 'Government Regulation Number 21 of 2020' on March 31, 2020 by the President of Indonesia. After that, due to economic considerations and welfare factors for the lower-class people, there was a slight leeway through the 'new normal' policy regulated in the Minister's Decree of Health Number HK.01.07/MENKES/328/2020 concerning the 'COVID-19 Prevention and Control Guide in the Workplace' Offices and Industry' in supporting business continuity in a pandemic situation there needs to be a concrete implementation by involving the government at level II (Regency/City) to jointly pay attention to health protocols.

From *Table 2*, it can be seen that the essence of the 'new normal era' that occurred in Bontang City and how they responded to it. As a result, most of the informants certainly understand the 'new normal' and continue to work or have activities outside, but still refer to health protocols. For those who work in the private sector, of course not all work outside the room, only for technical workers such as UPTD or indeed jobs that cannot be represented or use technology. However, for some government employees whose job desks are administratively based, of course, they must emphasize the use of digital information, where bureaucratic services to the population can be helped by technology which is deliberately designed so that they do not meet face-to-face. In addition, services with a support system, of course, make it easier in terms of time, cost, and energy, such as making electronic ID cards, family cards (family cards), and forms or things that can be accessed online. This

certainly helps the community and the wheels of government. It is also similar to the online learning scheme which emphasizes teachers and lecturers at schools up to the university level to jointly use a network that is connected via a mobile phone or computer that is already connected to the internet. Ilmi et al. (2020) explained that in the era of the industrial revolution 4.0, it was not only education that was helped, but the service sector by the government and companies was largely determined by technological sophistication.

During implementing the 'new normal' or scheme like before, COVID-19 respondents really understand that conditions in their activities need to be careful by implementing the existing health protocol. Those who work in various fields, of course, must obey the regulations that have been made, both from the central government and local governments. The informant must also set a good example for the civilian population with an attitude at work. Referring to *Table 2*, it is dominant to say 'yes' to continue working as usual during the 'new normal'. However, 48.4% of respondents are also always orderly and remain vigilant with the policy of limiting working hours and work from home (WFH) or can meet from the office or home via online depending on the level of intensity of the work itself. If it is not urgent, then online equipment can be applied, but if it is urgent and must come to the office, they can also carry it out through '5M' as explained in the previous session. In the rest, some respondents think that sometimes or around 35.6% think that part of the work can also be divided using the system provided by the office. There are also those who say they "don't" want to take risks to carry out activities like before the COVID-19 hit, because the safety aspect of themselves, their families, and those around them is their reference as well as the scale in Bontang City in the "red zone" of the transmission of this pandemic. It all depends on the phenomenon and the need for respondents who consider whether when they leave the house it is necessary, such as buying primary needs or other things that are urgent and cannot be represented by others.

Of course, all elements hope that this difficult time will end soon. The genuine shock of COVID-19 has become a 'trend' that cannot be forgotten until one day. Even so, 217 respondents strongly believe that this situation will end soon. There are also those who think they "don't know" when this global epidemic will end. A total of 283 respondents surrendered and surrendered completely to God's destiny by giving full motivation and trust to humans who can solve this challenge. Because it is not impossible, every problem must have a solution, so that over time it will be resolved. Indeed, the latest prediction from WHO (2021) that this virus will end soon in 2-3 periods, but it all depends on the policies of each country. They are also the ones who can monitor and track the extent of the response. At least, the priority through vaccines to people who are on the 'front line' such as the medical world, soldiers, police, government employees, teachers, to those who are vulnerable to transmission, are still considered. Prevention from all directions has been implemented and minimizes the risk of infection, so that there are no more victims.

Table 2: Respondents' assumptions (N = 500)

Response	Frequency	Percentage
<i>Towards the new normal</i>		
Understand	478	95.6
Not really understand	22	4.4
<i>When new normal</i>		
Yes	248	48.4
Sometimes	178	35.6
No	80	16
<i>The end of the pandemic</i>		
Will end	217	43.4
Don't know	283	56.6
<i>Use of masks</i>		
Yes	460	92
Sometimes	37	7.4
No	3	0.6
<i>Washing hands</i>		
Yes	448	89.6
Sometimes	49	9.8
No	3	0.6
<i>Keep the distance</i>		
Yes	347	69.4
Sometimes	145	29
No	8	1.6
<i>Stay away from the crowd</i>		
Yes	364	72.8
Sometimes	129	25.8
No	7	1.4
<i>Reduce traveling</i>		
Yes	408	81.6
Sometimes	76	15.2
No	16	3.2
<i>Feelings about the pandemic</i>		
Fed up	374	74.8
Sometimes	111	22.2
Not saturated	15	3
<i>Attitude to vaccination</i>		
Agree	323	64.6
Doubtful	148	29.6
Disagree	29	5.8
<i>Vaccine readiness</i>		
Willing	369	73.8
Not willing	131	26.2

Source: creations by the author (2022).

For implementing one part of the health protection (the use of masks), respondents tend to have obeyed it. What is also seen in *Table 2*, it is clearly illustrated that if 460 respondents out of 500 samples of them, there are 92% who are always aware of this virus to always wear masks. There are also the remaining 0.6% of them who deliberately do not use masks, not because they do not care (ignorant) about this pandemic, but there are health factors that are the reason. The 3 people also did not want to obey the existing health protection, because they have a history of asthma (respiratory problems) which, if using a mask, only a little oxygen can enter the lungs and a specialist has consulted this. Of course, it will be quite dangerous for people with this disease background if the minimum oxygen content that can be inhaled is tiny and will interfere with the respiratory tract that is activated when wearing a mask (especially if in an airtight or humid room). The answer 'sometimes' was also given by 37 respondents with reasons depending on the situation and conditions. If they work in a certain room with minimal staff or WFH, they definitely don't need a mask because if they make a speech during an online meeting, it will be considered impolite to wear a mask. In addition, after coming home from work and at home, they certainly do not wear masks because they adjust to the situation and all respondents must take a shower and immediately wash their work clothes in order to reduce the risk of transmission.

The second role is 'washing hands', where the level of awareness of the respondents so far is very aware of doing that. The rest, there are 52 respondents who think they wash their hands sometimes and not at all. This does not mean that 10.4% of them do not want to obey the health guarantee. However, 'sometimes' or 'not' meant that some of them brought equipment such as hand sanitizer (liquid or spray) which they had prepared themselves. Because the hand washing facilities provided in offices, shopping places, markets, and others sometimes cause crowds. People are crowded together to queue to wash their hands in certain places. Some are running out of water and even soap, so hand sanitizers are practical to take anywhere and anytime.

The third highlight is 'maintaining a distance', which will determine the transmission of COVID-19. It should be noted that for everyday life, 69.4% of respondents have implemented protocol through keeping a distance from other people. Interestingly, it was revealed that there were 30.6% who stated sometimes and not. The fourth threat is 'stay away from the crowd'. The weakness of people who at the same time cannot be separated from the real meaning of life is 'humans are social creatures'. It doesn't mean it's bad or unnecessary, but the situation doesn't support it at this time, namely making close communication or contact. In the context of prevention, staying away from the crowd is considered something appropriate. As information from the research team in the field, at least there are many responses that understand this meaning. The rest, 129 respondents stated that

they 'sometimes' do not contact other people and the remaining 1.4% 'do not at all' pay attention to enormous crowds. This is, of course, very difficult to implement, because the individual 'humanist' factor towards other individuals is a pattern and habit that humanity has lived in the past until now.

Another gap is that 'reducing travel' is very appropriate for preventing pandemic transmission. A special note, as the last point in the '5M' and the concept that the response must practice to always be aware of the dangers of this virus. An example that can illustrate current phenomena and challenges is how a person's 'mobility' can be reduced, at least. The research team's findings are based on exploration, where there are still respondents who 'sometimes' or even 'no' can reduce their mobility at all as part of the 'meaning of progress'. However, 81.6% thought they could implement this fifth concept.

Humans have certain feelings to describe their psychological condition towards a certain subject and object. Individual experiences when experiencing work stress, bored with things that are considered boring, and the need for significant changes in the surrounding environment can determine their psychology to continue to develop and adapt to other humans. Romadhoni et al. (2015) of the relevant findings to imply the phenomenon of 'burn out', which is now popular again being discussed by researchers or scientists, has actually been discussed. It is natural for individual characters to express what they experience in everyday life.

The informant's response to this also assessed their feelings based on 3 groups (saturated, sometimes, and not). Generally, they express the COVID-19 pandemic, which has been running for these 2 periods with a 'saturation'. That is, there are 74.8% of respondents who certainly feel anxious about conditions that cannot be found out and are resigned to how it will go. In addition, 22.2% thought that 'sometimes' this psychological condition appeared immediately and only at certain times and those who responded with 'not saturated' were only considered by 15 respondents because they were used to WFH or being alone in certain jobs.

The surefire step that is expected to reduce respondents' anxiety is the arrival of the 'COVID-19 vaccine', so the research team includes these indicators and reviews whether they are willing and to what extent their attitudes are. The attitude of 'agreeing' to the vaccine nicknamed 'Sinovac' which was ordered in the UK in 2020 ago and was distributed at a scheduled time or stage, could convince 323 respondents (64.6%). Interestingly, there are still 29.6% of 'undecided' (148 respondents) and 29 respondents, or 5.8% of them who 'disagree'. The reason behind these two answers is that they wait for the turn of some parties who have been vaccinated first, then decide to 'agree' to the vaccine, so that respondents' doubts can be reduced. There are also those who do not agree, because the information circulating through word of mouth and social media influences their decision. Of course, each policy must have its own consequences. There are things that the government must socialize, thus opening additional insights into all elements.

From the respondent's willingness to vaccine, it can't be forced just like that. Every resident in Indonesia has the same 'Human Rights', as well as obligations in order to protect the entire nation and homeland. During the observation period, the research team concluded that there were still quite several 'unwilling', namely 131 respondents (26.2%) and the rest (369 respondents) or 73.8% of the observations to 500 samples that felt ready or 'willing' if vaccinated.

4.2. Economic pressure

Economic reasons are certainly in the spotlight and consideration for the research team to see the extent of the impact of COVID-19 on the economic problems of the people in Bontang City from a microscope.

In fact, the team found some respondents stated that 96% were still 'still working' and the rest were classified as 'still working, but temporarily still being laid off' (7%), and 2.6% of the total 500 respondents thought they had been laid off by the office or place of business. Our focus is, of course, those who work part time (temporarily) or who have been laid off. This is because there are still 4% or 20 respondents who experience difficulties because of a decrease in company turnover (business ventures) in certain sectors, such as small and medium trade and MSMEs (see Table 3).

Since the 'PSBB' policy was implemented, inevitably some government offices or companies have followed the rules. However, because most respondents work as private employees, it is not possible to carry out 'Work from Home (WfH)'. This is in contrast to the fact that only a few of the informants or around 4.4% of them always work from home, because they are people who have occupied the highest position, structure, or class in their institution or office, so respondents like this only focus on coordinating with subordinates and controlling the performance of their employees from the screen. There are also 55.6% of the interviewees who work as normal and some apply some to going to the office, limiting working hours, and taking turns with other employees (shift-work) in order to implement protocol. There are 200 respondents or 40% of the total number who do not allow 'WfH' due to their work which is very technical and cannot be represented, such as PLN employees, PDAM employees, farm laborers, and small traders, or construction workers who rely solely on daily wages.

Based on the principal occupation of the respondents, out of 500 of them, dominantly came as private employees who had worked in the company for a long time (49%). The second most common field of work is as an entrepreneur or those who work for other people or are self-employed and assisted by employees to work with daily and monthly wages of 15.2%. On the one hand, only a few respondents with a history of work as a doctor/midwife/nurse/pharmacist are 1.4%. This shows that there are still few health workers in Bontang City. To prevent COVID-19, which requires many medical personnel (considering the increasing number of transmissions) which requires quick treatment. It is concluded that the respondents

have quite diverse occupational backgrounds, and this gives a signal of their general welfare ability or per capita income. Referring to the determination of the Minimum Wage (UMK) for 2020 and 2021 at Rp. 3,182,706, it actually experienced a slight decrease compared to the previous period, precisely in 2019 it was Rp. 2,933,099 (Central Bureau of Statistics of Bontang City, 2020). This impact affects the respondent's response, which explains that most of the monthly income is between Rp. 2,000,000 – Rp. 3,500,000 or 175 respondents (35%), so it can be classified as Meanwhile, only a few of them have low incomes (<Rp. 500,000), where there are 9.6% or 48 people.

So far, there has been no real explicit impact of COVID-19 affecting respondents' income. However, this needs to be watched out for because this global virus is likely to last a long time and can slowly bring down the economy of all sectors. It is known that there was an informant's response that stated 'fixed income' as part of the spread of COVID-19, namely 50.6%. However, the remaining 45%, they actually think that the pandemic has reduced their income, because those here belong to the group of workers who only rely on daily wages/salaries.

The reason for the increase in their salary is that there are special incentives for the COVID-19 team and there are also many who do not comply with the rules, so there is a perception from some people that there is now a 'new normal' and consider it as usual. The phenomenon of a decrease in income is because, as is known in various countries and regions, so far employment has decreased and it is difficult to find work. There have also been road closures to reduce the spread of the positive number of COVID-19 and many sales have declined.

Meanwhile, shops are getting quieter, and more people are choosing to stay at home. There is also the opinion that if it lay them off, it will be difficult to find work. Other factors are that more people comply with health protocols, no commissions, some allowances are removed, the UMK does not increase, fewer crowds, fear of going out of the house, many activities cannot go offline, BDR school children (can come from home), the weather is not supportive, garden businesses are temporarily closed, work and working hours are limited, rarely come to work, rarely receive orders, people wash themselves at home, so the laundry business is quiet, parents have minimal participation to pay for school administration (even though their work is a civil servant), livestock are not sold, and so on.

Of the 22 respondents who experienced an increase in income, the most experienced an increase in income of less than 25%, only 1 respondent had an increase of 75% to 100% and there was no respondent whose income increased by 100%. Table 3 also highlights 225 respondents who experienced a decrease in income, the most (81 respondents) experienced a decrease in income between 50% to 75%, then 69 respondents experienced a decrease of 25% to 50% and there were 8 respondents who experienced a 100% decrease in income or more.

Of the 500 respondents, it was confirmed that 297 respondents (59.4%) had received social help from the government or companies and 203 respondents

(40.6%) had never received help. The types of help received were: basic food help (128 respondents), cash social assistance (21 respondents), direct cash assistance (BLT) from 91 respondents, electricity subsidies (13 respondents), pre-employment cards (28 respondents), employee salary subsidies (24 respondents), BLT micro and small businesses (26 respondents), Corporate Social Responsibility (CSR) of 8 respondents from companies such as PKT and PLN, and others there are 17 respondents who both receive masks, PDAM subsidies, BPJS employment, vitamin, and PKH.

Changes in consumer behavior in general in interpreting COVID-19 are shown by the transformation of consumption, which was originally shopping as normal, now done online. Because most of them work and carry out activities at home, there is nothing wrong for a while preventing the transmission of COVID-19, then switching to an online system, including ordering goods and equipment or household needs through leading sites such as Tokopedia, Shopee, and others. It was reported that there was an increase of 18.8% or 94 respondents from the total (500 respondents) who prefer to shop online. However, for those who have never been, 25.6% of them choose to shop as usual because there are special and urgent needs, such as vegetables and staple foods that are more delicious, go straight to the market and are definitely fresher than online. In addition, there are also those who continue to shop like normal time, around 37.8% of respondents also carry out shopping activities as usual because they think that time, energy, and costs are more efficient and effective.

Table 3: Economic access (N = 500)

Response	Frequency	Percentage
<i>Job status</i>		
Yes, work	480	96
Yes, working but temporarily at home	7	1.4
No, I was just laid off because the office/business place was closed	13	2.6
<i>WFH</i>		
Always working from home since WFH	22	4.4
There is still a schedule to enter the office	128	25.6
Working as usual	150	30
Does not allow WFH	200	40
<i>Profession</i>		
Lecturer and teacher	14	2.8
Government employees, police and soldiers	40	8
Trader	15	3
Farmers (planters)	13	2.6
Fisherman	15	3

Company employees	245	49
BUMN/BUMD employees	24	4.8
Honorary employee	9	1.8
Laborer	25	5
Doctor/midwife/nurse/pharmacist	7	1.4
Self-employed	76	15.2
Others	17	3.4
	<i>Income</i>	
<500,000	48	9.6
500,000 – 2,000,000	129	25.8
2,000,000 – 3,500,000	175	35
3,500,000 – 5,000,000	77	15.4
>5,000,000	71	14.2
	<i>Impact of COVID-19 on income</i>	
Increase	22	4.4
Constant	253	50
Decrease	225	45
	<i>Percentage increase in income</i>	
<25%	12	
25% - <50%	6	
50% - <75%	3	
75% - <100%	1	
≥100%	0	
	<i>Percentage of decline in income</i>	
<25%	47	
25% - <50%	69	
50% - <75%	81	
75% - <100%	20	
≥100%	8	
	<i>Social assistance recipient status</i>	
Accept	297	59.4
Do not accept	203	40.6
	<i>Online shopping activity</i>	
Never	128	25.6
Increase	94	18.8
Constant	189	37.8
Decrease	89	17.8
	<i>Increased online shopping</i>	
<25%	46	
25% - <50%	26	
50% - <75%	13	
75% - <100%	5	
>100%	4	
	<i>Decreased online shopping</i>	

<25%	49	
25% - <50%	13	
50% - <75%	15	
75% - <100%	11	
>100%	1	
<i>Expenditures for foodstuffs</i>		
Increase	167	33.4
Constant	258	51.6
Decrease	75	15
<i>Expenditures for prepared food/beverages</i>		
Increase	155	31.2
Constant	260	51.8
Decrease	85	17
<i>Expenditure on health</i>		
Increase	276	55.2
Constant	192	38.4
Decrease	32	6.4
<i>Expenditure on electricity</i>		
Increase	157	31.4
Constant	313	62.6
Decrease	30	6
<i>Expenses for credit and data packages</i>		
Increase	265	53
Constant	206	41.2
Decrease	29	5.8
<i>Expenditure for fuel oil</i>		
Increase	58	11.6
Constant	341	68.2
Decrease	101	20.2

Source: creations by the author (2022).

It is interesting to describe the percentage increase and percentage decrease in respondents' online shopping compared to normal times as usual. Specifically, less than 25% of them (out of 94 respondents) have increased and these 46 people feel that there is indeed no additional consumption quota considering that it is in line with their income, which has also not increased since this pandemic hit. Similar to the increase, there is also a decrease in online shopping by 49 respondents (<25%) who think that shopping intensity decreases because of dynamic welfare levels.

A total of 167 respondents (33.4%) with increased spending on foodstuffs (groceries, vegetables, raw side dishes) during the pandemic, 75 respondents (15%) decreased and 258 respondents remained (51.6%).

Of the 500 respondents, there were 167 respondents (33.4%) with increased expenditure on food ingredients (groceries, vegetables, raw side dishes) during the

pandemic, 75 respondents (15%) decreased and 258 respondents remained (51.6%). Meanwhile, respondents' expenditure on types of prepared food and beverages, there were 55 respondents (31.2%) with increased expenditure on prepared food/beverages during the pandemic, 85 respondents (17%) decreased and 260 respondents remained (51.8%).

The community has also followed the pressure from the Government to reduce the transmission of COVID-19 through their respective awareness. As supporting information, it is explained that there has been a drastic increase in expenditures in the health sector, such as medicines, vitamins, and sanitation. The global pandemic has affected individual behavior, at least to expect through motives and precautions with household health equipment.

Besides the transformation of spending in the health sector, respondents also have a tendency to increase spending on electricity. It can be seen that there is an additional 31.4% of electricity consumption. From the number of respondents' 500 units, there are also those who assume that this type of expenditure remains (62.6%) and the rest actually decreases (6%). For those who work from home, there is actually a wasteful trend for spending electricity. How not, working from home also requires internet fees or data packages for smart phones which are not less than before COVID-19.

Expenses from credit also seem to increase from time to time. Because there are 265 respondents (53%) of whom feel the need to top up their credit every time and coordination remotely with co-employees or employees is more intensive. Automatically, this will consume electricity to charge more. The rest, there are 206 respondents who said it was fixed and that it decreased by around 5.8%.

The effect of the pandemic does not seem to have a significant effect on those who continue to carry out activities such as working outside the home, because there are 341 respondents who respond to spending on fuel oil (BBM) on a constant and fixed basis. Meanwhile, 101 respondents think it has decreased because those here are classified as workers who only work from home.

4.3. Other Pillars

For public transportation, including online respondents reasoned to remain as users (75.4%). The reason COVID-19 doesn't seem to have a significant effect on those who are considered fans of public transportation and online. Only slightly increased or decreased, where the research team found that around 24.6% actually got more intense and turned to private transportation for fear of meeting crowds and reducing outdoor activities such as public facilities, shopping places, and so on that invite crowds. mass.

Table 4: Other factors

Response	Frequency	Persentase
<i>Expenditures on public transportation</i>		

Increase	41	8.2
Constant	377	75.4
Decrease	82	16.4
<i>History of being infected with COVID-19</i>		
Yes	43	8.6
No	457	91.4

Source: creations by the author (2022).

Our next search is how to see the respondent's perspective on the history of COVID-19. As a result, identification in the field explored only a few respondents who claimed to have been exposed to this infectious virus as much as 8.6%. In fact, honesty is very important as part of information disclosure to support local government programs in infection prevention efforts. Those who think no are around 91.4%, because they have never carried out tracing through swab-tests and rapid antigen in stages. There are also those who argue that they have never been infected based on medical results and the rest have followed government recommendations for vaccination. In Table 4 examines those who have been vaccinated, namely respondents who are on the 'front line'. It included this means that they in the work as health workers, TNI, Polri, government officials, teachers, and lecturers.

5. CONCLUSIONS

This is the last point in this special study, which focuses on the findings along with what the Bontang City Government can apply strategic steps in responding to the socio-economic conditions amid this disaster.

Indeed, the respondents are very understanding about the dangers and what preventive measures must be implemented, for example, with the '5M' and vaccination. However, what has become the focus of the research team in the field is the psychological condition that is worrying if COVID-19 does not end. Economic problems may not be the only cause of this chaos, but restoring individual psychological well-being is certainly much more difficult. Considering that this global pandemic has been happening for 2.5 years in various countries (including Indonesia), it is not impossible that humans have lost their minds and run out of patience, so the 'new normal' is implemented without official government instructions. Of course, this is the biggest threat to humanity, considering that mass crowds are the culprit in the high rate of transmission of the virus.

Besides additional efforts focused on government, it made recommendations for future studies that need to consider sample size and target respondents. This is because not all regions, be it at the national level or at the regional scale, have similar characteristics, but different case studies of social effects since the emergence of COVID-19. There is special attention and in-depth understanding, also focused on the use of data analysis techniques, to produce varied findings.

This study also paves the way for future theoretical implications and academic contributions to continue to inspire, highlight, and take seriously the idea of what is most appropriate to reverse the socio-economic effects of the pandemic.

REFERENCES

- Amalia, S., Lestari, D., & Nurjanana, N. (2020). Changes in household consumption during the COVID-19 pandemic: an empirical from Samarinda City, Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 5603-5614. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR2021161>
- Ayuningtyas, D., Haq, H. U., Utami, R., & Susilia, S. (2021). Questioning the Indonesia government's public policy response to the COVID-19 pandemic: black box analysis for the period of January-July 2020. *Frontiers in Public Health*, 9, 612994. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.612994>
- Bavel, J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Crockett, M. J., Crum, A. J., Douglas, K. M., Druckman, J. N., Drury, J., Dube, O., Ellemers, N., Finkel, E. J., Fowler, J. H., Gelfand, M., Han, S., Haslam, S. A., Jetten, J., Kitayama, S., ... Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nature Human Behaviour*, 4(5), 460-471. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>
- Bowen, G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Central Bureau of Statistics of Bontang City. (2020). *Kota Bontang dalam angka [Bontang City in numbers]*. Samarinda: Suvi Sejahtera.
- Central Bureau of Statistics of East Kalimantan. (2020). *Analisis Provinsi Kalimantan Timur edisi terbaru 2020 [Analysis of East Kalimantan Province latest edition 2020]*. Retrieved from <https://kaltim.bps.go.id/publication/2020/12/28/e919ac148799b217be6dab93/analisis-isu-terkini-provinsi-kalimantan-timur-2020.html>.
- Central Bureau of Statistics of Indonesia. (2020). *Kemiskinan dan ketimpangan [Poverty and inequality]*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Cooper, M. A., & Gordon, J. L. (2021). Understanding panic buying through an integrated psychodynamic lens. *Frontiers in Public Health*, 9, 666715. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.666715>
- Damanik, D. W., & Saragih, J. (2021). Konseling tentang COVID-19 dan pelaksanaan protokol kesehatan dengan 5M. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 1(1), 15-18. Retrieved from <https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakamitra/article/view/9>
- Darma, S., & Darma, D. C. (2020). Food security management for Indonesia: the strategy during the COVID-19 pandemic. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 8(4), 371-381. <https://doi.org/10.2478/mdke-2020-0024>
- Ilmi, Z., Darma, D. C., & Azis, M. (2020). Independence in learning, education management, and industry 4.0: habitat indonesia during COVID-19. *Journal of Anthropology of Sport and Physical Education*, 4(4), 63-66.

- Hazra A. (2017). Using the confidence interval confidently. *Journal of Thoracic Disease*, 9(10), 4125–4130. <https://doi.org/10.21037/jtd.2017.09.14>
- Indah, A. V., & Muqsith, A. (2021). Panic buying: konsumerisme masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 perspektif psikoanalisis jacques lacan. *Jurnal Filsafat*, 31(1) 24–48. <https://doi.org/10.22146/jf.56722>
- Gandasari, D., & Dwidienawati, D. (2020). Content analysis of social and economic issues in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Heliyon*, 6(11), e05599. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05599>
- Gujarati, D. N. (2012). *Basic econometrics*. Noida: Tata McGraw-Hill Education.
- Mohsin, A., Hongzhen, L., & Hossain, S. F. A. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on consumer economy: countermeasures analysis. *SAGE Open*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.1177/21582440211008875>
- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case study method: a step-by-step guide for business researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406919862424>
- Romadhoni, L. C., Asmony, T., & Suryatni, M. (2015). Pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, dan dukungan sosial terhadap burnout pustakawan di Kota Mataram. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 3(2), 125-145. <https://doi.org/10.24252/kah.v3i2a3>
- Roy, J., Hasid, Z., Lestari, D., Darma, D. C., & Kurniawan A, E. (2021). COVID-19 maneuver on socio-economic: exploitation using correlation. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 146-162. <https://doi.org/10.21009/JPEB.009.2.6>
- Saha, K., Torous, J., Caine, E. D., & De Choudhury, M. (2020). Psychosocial effects of the COVID-19 pandemic: large-scale quasi-experimental study on social media. *Journal of Medical Internet Research*, 22(11), e22600. <https://doi.org/10.2196/22600>
- Singh, G., Aiyub, A. S., Greig, T., Naidu, S., Sewak, A., & Sharma, S. (2021). Exploring panic buying behavior during the COVID-19 pandemic: a developing country perspective. *International Journal of Emerging Markets*, Vol. ahead-of-print, No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-03-2021-0308>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: an overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tanjung, D., & Purnamadewi, Y. L. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on mses and cooperatives and strategic recovery in new normal era. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 12(3), 220-231. <https://doi.org/10.29244/jmo.v12i3.39197>
- Wang, Z., Zhang, Z., Zhang, Q., Gao, J., & Lin, W. (2021). COVID-19 and financial market response in China: micro evidence and possible mechanisms. *PloS One*, 16(9), e0256879. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256879>
- World Health Organization. (2021). *Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public*. Retrieved from <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yijo, S., Asnawati, A., Darma, S., Achmad, G. N., Arizandi, M. A., Hidayati, T., & Darma, D. C. (2021). Social experiments on problems from tomato farmers

during COVID-19 - Indonesia case. *SAR Journal - Science and Research*, 4(1), 7-13. <https://doi.org/10.18421/SAR41-02>

Yuhertiana, I., Zakaria, M., Suhartini, D., & Sukiswo, H. W. (2022). Cooperative resilience during the pandemic: Indonesia and Malaysia evidence. *Sustainability*, 14(10), 5839. <https://doi.org/10.3390/su14105839>

BIAODATA PENELITI

(KETUA)

A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Dr. Juliansyah Roy, SE, M.Si
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	III-c / Lektor
4.	Jabatan Struktural	Sekretaris Gugus Jaminan Mutu FE Unmul
5.	NIP	19810719 200501 1 001
6.	NIDN	0019078101
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Samarinda, 19 Juli 1981
8.	Alamat Rumah	Jl. Sultan Alimuddin No. 54 RT. 33 Samarinda
9.	Nomor HP	085255130124/08125483936
10.	Alamat Kantor	Jl. Tanah Grogot No. 01 Kampus FE Unmul
11.	Nomor Telepon Kantor	0541 – 738915
12.	Alamat email	jlnsyh_roy@yahoo.com
13.	Mata Kuliah yg Diampu	1. Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan 2. Perekonomian Indonesia 3. Statistik Ekonomi 4. Ekonometrika 5. Metodologi Penelitian

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Keterangan	Jenjang		
	Strata 1 (S-1)	Strata 2 (S-2)	Strata 3 (S-3)
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman	Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin	Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Bidang Ilmu/Konsentrasi	Ilmu Ekonomi	Ekonomi Sumberdaya	Ilmu Ekonomi
Tahun Masuk-Lulus	1999-2003	2005-2007	2008-2013
Nama Pembimbing utama	Warsilan, SE., MT	Prof. Dr. I Made Benyamin, M.Ec	Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, M.A

C. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Jt-Rupiah)
1.	2016	Karakteristik Industri Kecil Manufaktur dan Dampaknya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur	DIKTI	72.500.000
2.	2015	Dampak Desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, kesempatan kerja dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur	DIKTI	50.000.000
3.	2014	Identifikasi modal serta dampaknya terhadap kinerja dan kesejahteraan usaha kecil di Kota Samarinda	DIKTI	40.000.000,-
4.	2013	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Capital Flight</i> pada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Provinsi Kalimantan Timur	BALITBANGDA PROV. KALTIM	100.000.000
5.	2012	Penyusunan model ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kutai Kartanegara	BAPPEDA Kab. Kutai kartanegara	250.000.000,-

D. PENGALAMAN PUBLIKASI ILMIAH

No	Judul	Jurnal /Volume/Tahun
1	Identifikasi modal serta dampaknya terhadap kinerja dan kesejahteraan usaha kecil di Kota Samarinda	Forum Ekonomi / Vol.XVI. No. 2 / Juli 2016
2	Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur	Forum Ekonomi / Vol. XVI No.1 / Januari 2015
3	Pengaruh pengeluaran pembangunan dan tingkat bunga terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi di Kalimantan Timur	Forum Ekonomi / Vol. XIV No. 2 / Juli 2014
4	Pengaruh pengeluaran pembangunan dan tingkat bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur	Inovasi / Vol. 6 No. 2 / Juli 2013

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan

Samarinda, Juni 2022

Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juliansyah Roy', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and cursive.

**Dr. Juliansyah Roy, SE, M.Si
NIP. 19810719 200501 1 001**